



## *Salam dari Redaksi*



**PADA** 17 Agustus 2012, bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-67. Sebuah momentum yang tepat untuk merevitalisasi semangat kebangsaan dalam konteks persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu masalah besar yang dihadapi sekarang ialah masih tingginya angka kemiskinan. Sebuah paradoks dan ironi kita alami dalam pembangunan. Bank Dunia memperkirakan, saat ini, sekitar 50% penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, kesenjangan sosial kian parah, bukan hanya di pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Kemiskinan dan kesenjangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ialah masalah kolusi dan korupsi. Padahal, sesuai dengan kesepakatan MDGs, Pemerintah Indonesia telah menargetkan pada tahun 2015, pengentasan kemiskinan minimal telah mencapai 50% dari seluruh masyarakat miskin di Indonesia. Tapi, apakah target tersebut akan tercapai?

Banyak kalangan yang pesimis, melihat carut-marut situasi saat ini. Semangat otonomi daerah yang digulirkan, ternyata melenceng menjadi eksploitasi, membuat kesenjangan yang semakin lebar, menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin buruk, serta memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan korupsi. Ganasnya gempuran liberalisme dan kapitalisme yang menusuk hingga ke jantung pedesaan, makin membuat para petani tak berdaya. Kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat yang terjadi di seluruh tanah air, sungguh sangat tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Realitas tersebut merupakan suatu tantangan dan kesempatan bagi setiap warga dan komponen bangsa untuk mewujudkan semangat kebangsaan dengan terlibat mengatasinya melalui berbagai bidang dan ragam pendekatan. Dibutuhkan langkah-langkah yang strategis, kebijakan-kebijakan, aksi-aksi sosial konkrit, sinergi dan kerja sama untuk yang mendukung kemandirian dan keberdayaan rakyat, menciptakan situasi yang kondusif sehingga seluruh warga, tanpa kecuali, dapat hidup layak dan sejahtera.

## **DAFTAR ISI**

<i>Salam dari Redaksi</i> .....	1
<b>Aktualia</b> .....	2
Memaknai Kemerdekaan, Membangun Kesejahteraan Bangsa .....	2
67 Tahun Indonesia Merdeka, Paradoks atau Ironi? .....	4
Memaknai 67 Tahun Indonesia Merdeka .....	6
<b>Analisa</b> .....	8
Kemerdekaan dan Kesadaran Pendidikan .....	8
LSM Mendukung Masyarakat Merdeka Seutuhnya! .....	12
Ekonomi Sumber Daya Hayati Untuk Indonesia .....	14
<b>Spiritualia</b> .....	16
Kebangsaan dari Sudut Pandang Umat Beriman .....	16
Cendekiawan Katolik di Tengah Liberalisasi Ekonomi .....	18
<b>Pastoralia</b> .....	21
Ensiklik Bapa Suci Benediktus XVI: Deus Caritas Est .....	21
Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes: Masyarakat Manusia.....	23

Maka dari itu, perubahan adalah sesuatu yang perlu terus dihembuskan melalui berbagai pendekatan, salah satunya melalui pendidikan yang kontekstual, relevan, dan berdaya ubah. Semangat kebangsaan dari semua umat beriman hendaknya memotivasi ke arah pencapaian cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Semangat kebangsaan dalam wujud solidaritas saling berbagi di bidang ekonomi harus semakin menjadi pilihan. Maka segala bentuk ekonomi yang dapat menyejahterakan kehidupan bersama perlu diprioritaskan dalam pembangunan. Koperasi yang sudah digagas oleh pendiri bangsa ini harus diperkuat. Kewirausahaan sosial yang memperhitungkan kearifan lokal dan potensi daerah, merupakan strategi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang makin membesar, sekaligus mengatasi eksekse serta dampak ekonomi pasar yang tidak dikehendaki. Bagi Gereja, khususnya cendekiawan Katolik, situasi tersebut menjadi suatu peluang untuk menjawab panggilan dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja.

Terkait dengan hal itu, dalam edisi Agustus ini redaksi mengangkat beberapa artikel yang meneropongi persoalan yang dihadapi bangsa ini beserta gagasan solusinya. Semoga, perayaan 67 Tahun Indonesia Merdeka menjadi ajang refleksi untuk memperkuat gerakan kita menuju masyarakat merdeka seutuhnya.

Merdeka!





## MEMAKNAI KEMERDEKAAN, MEMBANGUN KESEJAHTERAAN BANGSA

**DALAM** momentum peringatan ulang tahun ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2012, ajakan untuk membangun kesejahteraan bangsa tepat kiranya untuk digulirkan dan direalisasikan dalam menggapai cita-cita kemerdekaan dan mewujudkan semangat kebangsaan secara konkrit. Membangun kesejahteraan bangsa merupakan tugas konstitutif seluruh komponen bangsa. Sebab, UUD 45 tidak hanya merupakan konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi. Pada dasarnya konstitusi dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia ialah untuk memajukan kesejahteraan umum, maka berdasarkan konstitusi, negara Indonesia adalah negara kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah diberi wewenang oleh konstitusi agar melakukan tindakan apa yang berguna bagi pencapaian kesejahteraan bangsa ini. Salah satu tugas penting pemerintah ialah menggerakkan, menyediakan atau menyelenggarakan serta mengelola pelaksanaan kesejahteraan warga negaranya sesuai UUD 45, khususnya pasal 34 (*Lih. Kompas, 19 Juni 2012, hal. 7*).

Tentunya, tugas untuk mengupayakan kesejahteraan bangsa ini bukan hanya berada di pundak pemerintah. Semua komponen bangsa hendaknya bekerja sama, melalui berbagai cara dan menurut kapasitas masing-masing. Ajakan saling berbagi dalam semangat solidaritas sosial ekonomi untuk menanggapi keprihatinan sosial, terutama kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini, perlu terus dinyalakan, dan dijaga supaya api semangat kesetiakawanan berbasis kebangsaan ini tidak padam di tengah jalan. Menghadapi dampak negatif dari kapitalisme, dengan sistem ekonomi pasar bebas, yang mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar, ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan yang masih parah, praktek-praktek ekonomi dan gerakan-gerakan sosial pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama hendaknya terus diperjuangkan untuk memaknai kemerdekaan kita.

### Kewirausahaan Sosial

Gerakan kewirausahaan sosial merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan masyarakat. Kewirausahaan sosial bertujuan untuk membantu keberdayaan dan kesejahteraan bersama. Gerakan kewirausahaan sosial perlu terus didorong untuk meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Kewirausahaan sosial perlu menjadi pilihan, mengingat bahwa 98% perekonomian Indonesia saat ini dijalankan oleh pengusaha mikro. Hal ini dikemukakan Bambang Ismawan dalam sambutannya pada saat pendirian Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI). Penerima anugerah Social Entrepreneur of The Year 2006 ini mengajak pemerintah dan semua komponen bangsa untuk menyikapi hal tersebut, di mana kebijakan ekonomi sektor riil harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas, dan bertumpu pada proses pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan keterbelakangan di berbagai wilayah Nusantara. "Maraknya ketidakberdayaan masyarakat di berbagai sektor serta meningkatnya kemiskinan yang sangat memilukan hendaknya mendorong kerja sama dan sinergi untuk lebih meningkatkan upaya dan menyatukan gerak langkah yang berfokus pada peningkatan keberdayaan masyarakat dan memerdekakan warga bangsa dari jerat kemiskinan.

Menurut penerima Penghargaan Wirausahawan Sosial Ashoka Indonesia tahun 2009 ini, kewirausahaan sosial sangat strategis menjadi alat perjuangan, karena masyarakat dari berbagai lapisan dan sektor kegiatan mempunyai potensi yang besar jikalau bersama-sama menggalang keterpaduan dan memfokuskan upaya pemberantasan kemiskinan. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah kegiatan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building*), menghubungkan sektor Ekonomi Rakyat dengan lembaga-lembaga perbankan agar mendapatkan pelayanan keuangan, membangun jejaring kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memfasili-

tasi dan melindungi usaha-usaha ke arah keberdayaan masyarakat, membangun kerjasama saling menguntungkan dengan dunia usaha baik sektor keuangan maupun sektor riil, dan membangun jejaring kerjasama di antara sesama lapisan dan sektor masyarakat warga dengan lembaga nasional maupun internasional.

Hal senada juga disampaikan Ketua AKSI, Rhenald Kasali ketika menjelaskan tentang visi, misi dan tujuan berdirinya gerakan ini. Ia menyampaikan bahwa Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) mengusung ideologi perubahan sosial, yakni mengurangi kemiskinan melalui kewirausahaan. "Menggeluti perubahan sosial, ideologi yang dijalankan oleh *social entrepreneurs* ialah dengan setia berwirausaha seperti layaknya pebisnis. Hanya saja, yang membedakan ialah bahwa mereka menggunakan hasil keuntungannya bukan untuk melipatgandakan kekayaan, melainkan untuk membantu keberdayaan masyarakat agar bisa menikmati kesejahteraan. Para *social entrepreneurs* menggunakan hampir seluruh dividen yang dihasilkan untuk mengatasi kemiskinan. Penggerak sosial dengan basis kewirausahaan membantu masyarakat yang belum sejahtera agar secara ekonomi bisa mandiri, dan merdeka dari kemiskinan dan ketergantungan," jelasnya.

Sementara itu, Sandiaga Uno, salah seorang dari anggota AKSI, menekankan betapa pentingnya digerakkan kewirausahaan sosial di Indonesia yang berbasis pada kearifan lokal. Ia mengatakan bahwa leluhur bangsa kita telah mewariskan kearifan hidup untuk berbagi kepada sesama, dan melayani tanpa pamrih. "Bukan hanya manusia, alam pun dijaga mereka dengan penuh kasih. Setiap apa yang diberikan Tuhan melalui alam yang subur makmur ini, selalu disyukuri mereka dalam berbagai bentuk ritual penuh makna yang kini telah menjadi budaya. Seperti mata air yang jernih, nilai hidup melayani dan semangat mengusahakan kebahagiaan sesama, merupakan napas kehidupan yang tak pernah berhenti," ungkapnya.

Menurutnya, dengan jiwa penuh kasih dan semangat melayani, hidup pun menjadi mudah, dan tindakan dalam keseharian selalu bermanfaat dan mendapat berkah. Kearifan lokal yang diwariskan leluhur kepada kita dapat menjadi sumber daya kewirausahaan sosial dan perlu dikemas dengan pola pengembangan yang berbasis manajemen modern. Ia menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial dicirikan oleh empat elemen yaitu

tersedianya pasar dan porsi distribusi keuntungannya lebih banyak bermisi sosial. Untuk menggelindingkan kewirausahaan sosial ini, ia berharap seluruh elemen bangsa ini bergandengan tangan dan bergerak bersama. Dalam hal ini, peran pemerintah juga sangat strategis menentukan akselerasi keswadayaan menuju kemandirian bangsa. "Semakin banyak para pelaku kewirausahaan sosial yang memenuhi empat elemen di atas, maka akan semakin berdaya dan mandirlah bangsa ini," tegasnya.

### **Koperasi sebuah Pemberdayaan yang Memandirikan**

Terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan sosial untuk membangun kesejahteraan masyarakat, koperasi memainkan peran yang sangat penting dan strategis. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mengandalkan *social capital*, maka faktor penting dalam pengembangannya memerlukan upaya pemberdayaan bagi para anggotanya. Koperasi memusatkan perhatiannya pada orang, bukan pada modal, dan merupakan organisasi kerjasama. Koperasi berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Nilai lain yang diperjuangkan oleh koperasi adalah kegotongroyongan, kebersamaan dalam gerak, saling menolong, keswadayaan, dan solidaritas. Koperasi dalam memajukan ekonomi kerakyatan mengembangkan diri dalam semangat kemitraan kerja, dan mengembangkan usaha dengan konsep bermitra kerja.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, koperasi dapat merupakan suatu terobosan untuk membantu masyarakat kecil dalam mengatasi permodalan dengan kekuatannya sendiri. Melalui koperasi, masyarakat dimampukan untuk menolong diri dengan kekuatan mereka sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu pendekatan koperasi kredit dapat memecahkan masalah pembangunan bangsa ini dengan merombak ketergantungan menjadi kemandirian.

Melihat betapa strategisnya koperasi dalam upaya pemberdayaan rakyat, Pater Carolus Albrecht Karim Arbie SJ (1929-1999), merintis berdirinya Credit Union (CU) di Indonesia. Bagi Gereja Katolik, gerakan Koperasi Kredit atau dikenal dengan CU, dapat menjadi salah satu bentuk dan sarana untuk mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat miskin. CU yang lahir dari rahim Gereja merupakan salah satu "produk" yang "dikandung dan dilahirkan dari Ibu Gereja dan dipersembahkan untuk bangsa Indonesia.





## 67 TAHUN INDONESIA MERDEKA

### Paradoks atau Ironi?

Thomas Suyatno

**PADA** saat-saat menjelang peringatan 67 Tahun Indonesia Merdeka, ada baiknya kita memahami implikasi dan konsekuensi bahwa kemerdekaan kita merupakan hasil pergerakan nasional dan revolusi. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa, rakyat Indonesia selama berpuluh tahun terlibat secara aktif di dalam pergerakan dan kemudian dalam revolusi 17 Agustus 1945. Berlangsung proses penyadaran, pendidikan, dan pencerahan sosial politik di antara rakyat secara berkepanjangan, terus-menerus, luas, dan mendalam.

Itulah latar belakang hadirnya organisasi kemasyarakatan dan kerakyatan di dalam sejarah kita, yang banyak di antaranya menjadi organisasi yang besar dan perannya menentukan. Barang siapa mengalami atau mempunyai kenangan serta pengalaman tentang zaman revolusi, pasti masih menyimpan jelas gambaran bahwa betapa seluruh rakyat terlibat dalam revolusi kemerdekaan. Hal itu juga terlihat dari catatan dan analisis sejarah yang disusun oleh para ilmuwan sejarah, baik dari dalam maupun luar negeri. Pergerakan dan revolusi Indonesia melibatkan secara langsung pergerakan rakyat melalui berbagai gerakan dan organisasinya yang mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Ya, majemuk, sekaligus juga terikat pada komitmen dan kehendak bersama, yaitu memerjuangkan Indonesia Merdeka.

Apakah dampak dari pergerakan dan keterlibatan rakyat di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Kesadaran sosial politik rakyat yang tinggi. Oleh karena itu, rakyat menjadi gelisah dan resah ketika sistem sosial politik yang kemudian berkembang kurang atau tidak memberikan tempat kepada pergerakan rakyat lewat berbagai organisasinya. Terasa ada semacam rasa kering di tengah-tengah gegap-gempitanya pembangunan di segala bidang, terutama pembangunan ekonomi.

Ada semacam rasa terasing, tersingkir, terlantarkan, dan tertinggal. Tidaklah puas, sekiranya yang berlaku adalah **pembangunan untuk rakyat tetapi tidak oleh rakyat**. Apalagi ketika, fase-fase pembangunan yang disertai dengan kolusi dan korupsi membuat kesenjangan

an sosial ekonomi yang kian parah, juga kesenjangan antardaerah, antarpelaku ekonomi, bahkan antarindividu sehingga perasaan terasing, sepi, dan tertinggal, makin dirasakan.

Pergerakan dan keterlibatan rakyat yang kuat di dalam sejarah pergerakan dan kemerdekaan, pada batas tertentu masih dapat menerima argumen tentang timbulnya kesenjangan sosial ekonomi, secara rasional. Namun, sebetulnya secara emosional dan secara rasa keadilan, hal itu tidak dapat diterima. Oleh karena itu, terjadilah keresahan hati yang hanya sekali-sekali meletup ke permukaan walaupun kebanyakan lebih banyak tersimpan di dalam hati.

Kita memang patut bersyukur atas tetap tegaknya Republik Indonesia yang telah melalui gelombang pasang-surut. Kita juga bersyukur, bahwa Republik bukan saja tegak, tetapi berlangsung di dalam kearifan yang mereorientasikan kehidupan berbangsa kepada pembangunan, yang berfokus kepada pembangunan ekonomi.

Kita juga bersyukur karena bukan saja perikehidupan ekonomi yang meningkat lebih maju, melainkan juga keberhasilan di dalam menanamkan basis pembangunan, prasarana, institusi, dan sistem untuk kemajuan selanjutnya.

Namun, jika direnungkan lebih dalam, sebetulnya saat ini terjadi **paradoks atau ironi** yang kita alami: pembangunan, yang berhasil itu, justru membangkitkan rasa kekecewaan dan permasalahan, karena sekaligus disertai dengan **kesenjangan sosial ekonomi yang makin membesar**; karena disertai dengan eksekusi serta dampak ekonomi pasar yang tidak dikehendaki, misalnya tergusurnya berbagai kepentingan rakyat di dalam hal tanah, lokasi perumahan, dan usaha.

Ini adalah pekerjaan rumah kita yang sentral dan menentukan: kemauan dan konsistensi kita untuk memperbaiki kesenjangan, untuk secara lebih efektif,

melaksanakan pembangunan berbagai dimensi dan aspeknya--yang kala masa pemerintahan Orde Baru dikenal dengan istilah Trilogi: pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas.

Apa kendala dari usaha mengurangi dan mengendalikan kesenjangan? Secara objektif, untuk sebagian masalahnya terletak pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan atau antara pemerataan dan pertumbuhan. Memang, tidak mudah untuk menyeimbangkan keduanya sekaligus. Selain itu, kesulitan juga datang dari eksekusi dinamika ekonomi pasar serta berbagai pertimbangan perpolitikan yang tidak sanggup mengembangkan kekuatan yang bertanggung jawab dan yang dapat berperan sebagai *countervailing force*, kekuatan pengimbang terhadap *power that be*.

Seyogianya momentum peringatan 67 Tahun Indonesia Merdeka harus membersitkan kesadaran serta kemauan bersama untuk mengacarakan penanganan serta pengelolaan tantangan, hambatan, serta ancaman pokok bangsa Indonesia. Bukan saja kesenjangan sosial ekonomi, melainkan juga hal-hal subjektif yang menimbulkan ongkos sosial tinggi di dalam pembangunan kita. Wawasan dan komitmen nilai akan kepatuhan serta pengendalian diri, merosot hampir di semua lingkungan hidup. Etika bukan memberikan contoh ugahari dan menahan diri, melainkan justru ikut terbawa arus.

Masyarakat yang “kesepian” ikut-ikutan mencari pelepasan di dalam berbagai bentuk seni budaya populer yang dijajakan secara massal oleh industri elektronik. Jika tidak tertahankan, kekerasan yang macam-macam bentuknya, menjadi pilihan lain.

Sejalan dengan tradisi keterlibatan rakyat dalam pergerakan dan perjuangan Indonesia Merdeka, gugatan juga dialamatkan ke bidang sosial politik, termasuk bidang hukum dan peradilan yang terkesan makin amburadul. Mulai banyak terabaikan hal-hal tentang bagaimana memberikan ruang gerak yang memadai bagi ekspresi

serta usaha mewujudkan aspirasi; bagaimana memberikan ruang gerak yang memadai dan sesuai dengan semangat UUD Negara RI Tahun 1945, juga perihal hak berserikat, berkumpul, serta menyatakan pikiran secara lisan dan tertulis.

Komitmen kita yang bersih dan lurus, akan memengaruhi secara positif, kemauan serta kemampuan kita untuk membangun lewat jalan ekonomi pasar, dan secara konsisten harus mengacu kepada visi Indonesia, seperti tercantum dan terurai pada UUD Negara RI Tahun 1945.

Deviasi yang terjadi pada mulanya, mungkin untuk sebagiannya bersumber pada kemampuan kita di dalam tahap-tahap awal, yang serba mendesak itu, menyusun kombinasi yang pas antara ekonomi pasar yang kapitalistis dengan ekonomi pasar khas Indonesia. Namun, jika tidak diwaspadai, lambat laun, deviasi, dapat lebih banyak dipengaruhi oleh situasi yang memungkinkan berlangsungnya akumulasi kekuasaan secara sentral dan personal.

Sekali lagi, inilah saatnya, ketika kita memeringati bersama 67 tahun Indonesia Merdeka, kita bersama-sama, berdiri di depan kaca besar: dengan rendah hati, mau mengoreksi dan dikoreksi, serta melihat kelebihan dan keberhasilan, sekaligus juga secara sengaja dan seksama, melihat serta mencari kelemahan dan kekurangan kita.

Enam puluh tujuh tahun yang lalu, semua orang saling menyebut Bung, itulah wujud akar kerakyatan yang menjadi tema kembar peringatan 67 Tahun Indonesia Merdeka. Semua orang Bung. Artinya, tidak ada rasa enggan yang disebabkan oleh hidupnya kembali budaya kekuasaan dan budaya feodal.

Bung, Merdeka, Merdeka, Merdeka! Siapa yang merdeka? Hanya bangsa dan negara ataukah juga manusia Indonesia, manusia Merdeka Indonesia? Dirgahayu 67 Tahun Indonesia Merdeka!

*Penulis merupakan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia, Ketua Yayasan Pendidikan Tarakanita, Ketua Pembina Yayasan Bhumiksara*







## MEMAKNAI 67 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Lea Mediatrix Janwarin

*67 tahun Indonesia merdeka*

*67 tahun berlalu sejak pertama kalinya kemerdekaan bangsa kita diproklamasikan oleh para pendiri bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945*

*Dalam rentang waktu 67 tahun ini, kemerdekaan seperti apa yang dicapai dan dirasakan oleh bangsa kita?*

*Apa yang selanjutnya akan disampaikan dalam artikel ini hanyalah satu sisi kecil yang diangkat untuk merefleksikan 67 tahun kemerdekaan bangsa kita*

**SEJAK** kita duduk di bangku sekolah tentunya kita sudah sangat familiar dengan isi Pembukaan UUD 1945 yang selalu dibacakan dalam upacara bendera. Bahkan mungkin jika kita diminta untuk mengucapkan kembali apa isinya bukanlah sesuatu hal yang sulit. Tapi ingatkah kita bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 itu ada empat hal penting yang merupakan Tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Empat tujuan tersebut bukanlah hanya sekedar tulisan semata tetapi merupakan suatu arah dan cita-cita bangsa kita. Seperti halnya setiap orang yang memiliki tujuan hidup dan menempuh segala perjuangan untuk mencapainya dan kemudian melakukan evaluasi pribadi tentang sejauh mana tujuan hidup itu tercapai, hal yang sama pun berlaku untuk tujuan bangsa kita. Melakukan evaluasi kembali terhadap pencapaian tujuan bangsa adalah salah satu cara bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang ada.

Melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum adalah dua dari empat tujuan bangsa kita. Hal ini mengandung makna bahwa perlindungan dan kesejahteraan adalah hak umum, hak setiap warga negara Indonesia. Apakah hal ini telah terlaksana?

Mari kita melihat pada suatu peristiwa yang terjadi baru-baru ini yaitu sekitar pertengahan Juli 2012 di mana terjadi banyak protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh produsen tempe dan tahu karena kenaikan bahan pokok kedelai, yaitu dari Rp 6.000 menjadi Rp 8.000 yang mengakibatkan produsen tempe dan tahu tidak mendapatkan untung dari penjualan bahkan beberapa telah merugi. Kenaikan ini disebabkan karena adanya isu

kegagalan panen kedelai di Amerika yang membuat bursa komoditas untuk kedelai mengalami kenaikan. Alasan mengapa isu ini berdampak pada kenaikan harga kedelai di Indonesia karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, dari total kebutuhan kedelai di Indonesia hanya 29% yang bisa diproduksi oleh petani lokal sedangkan sisanya yaitu 71% harus diimpor dari beberapa negara termasuk Amerika. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sebutan Indonesia sebagai negara agraris karena kita justru menjadi negara yang persediaan pangannya sangat tergantung pada impor.

Pertanyaannya sekarang ialah mengapa produksi kedelai lokal kita sangat rendah dilihat dari total kebutuhan kedelai di Indonesia. Jawaban atas pertanyaan ini adalah karena petani lebih tertarik untuk menanam padi, jagung, dan lain-lain dibandingkan kedelai. Kurangnya ketertarikan petani menanam kedelai disebabkan karena belum adanya kejelasan jaminan harga kedelai saat panen raya yang berdampak terhadap penurunan harga secara signifikan ketika produksi kedelai melimpah. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani kedelai. Padahal jika dilihat dari besarnya kebutuhan masyarakat terhadap kedelai yang terus meningkat setiap tahun, seharusnya hal ini dapat memberikan efek positif terhadap kesejahteraan petani kedelai.

Petani adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Petani adalah ujung tombak ketersediaan pangan bangsa. Melindungi hak mereka dan mensejahterakan mereka adalah bagian dari tujuan negara. Dengan kesejahteraan yang mereka terima, petani akan semakin giat untuk menanam dan menghasilkan pangan yang tentunya akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan bangsa. Namun ketika petani merasa tidak dilindungi hak dan kesejahtraannya maka terjadi ketimpangan pangan yang sangat besar. Hal inilah yang terjadi dengan komoditas kedelai yang merupakan bahan pokok makanan khas orang Indonesia yaitu tempe dan tahu.

Dari salah satu sisi kecil yang ada di bangsa kita seperti yang dipaparkan di atas, apa yang bisa kita, umat Katolik lakukan sebagai bagian dari bangsa ini. Pahlawan nasional, Almarhum Mgr Soegijapranata, pernah berucap “Menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia”. Pesan yang terkandung dalam kalimat tersebut ialah bahwa kita sebagai umat Katolik harus memiliki jiwa nasionalisme. Bukan berarti bahwa hal ini tidak relevan lagi karena kalimat tersebut diucapkan ketika bangsa kita sedang dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan sekarang kita telah merdeka. Tetapi makna nasionalisme di saat ini adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu dengan ikut terlibat dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di bangsa kita.

Menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia memiliki makna bahwa kita sebagai anggota Gereja Katolik, ikut serta dalam pencapaian tujuan negara melalui bidang masing-masing. Salah satu contoh hal konkret yang perlu kita lakukan ialah melindungi hak dan mensejahterakan petani kedelai, membantu meningkatkan kualitas petani kedelai yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kedelai.

Perlindungan kepada petani kedelai dilakukan melalui pembuatan kebijakan pemerintah yang pro rakyat khususnya pro petani dalam hal ini petani kedelai. Suatu kebijakan pemerintah yang baik ialah suatu kebijakan yang tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek tetapi bagaimana hal tersebut juga bisa memberikan manfaat untuk jangka panjang. Tidak ada yang salah dengan kebijakan impor kedelai yang dilakukan oleh pemerintah karena itu dilakukan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan kedelai bangsa Indonesia yang belum bisa dipenuhi oleh petani lokal. Namun yang salah ialah bahwa kebijakan tersebut membuat bangsa kita menjadi sangat tergantung dengan kedelai impor. Hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat Katolik, khususnya mereka yang memiliki kapasitas dan ikut andil dalam pembuatan kebijakan adalah mengupayakan agar kebijakan tersebut bisa memberikan solusi tetapi tidak menimbulkan ketergantungan bangsa kita terhadap bangsa lain. Untuk impor kedelai mungkin perlu dilakukan pengurangan atau pembatasan secara bertahap. Pada tahap awal mungkin masih perlu jumlah banyak karena mendesaknya pemenuhan kebutuhan kedelai bangsa, namun selanjutnya kuantitas impor kedelai secara bertahap harus diturunkan. Penurunan kuantitas impor kedelai ini perlu didukung dengan

peningkatan kuantitas produksi kedelai lokal oleh petani lokal sehingga di masa depan bangsa Indonesia bisa secara mandiri menyediakan pangan khususnya kedelai. Agar petani bisa meningkatkan produksi kedelai, maka pemerintah harus membuat kebijakan perlindungan harga kedelai, khususnya ketika panen raya. Dengan demikian, harga kedelai tidak turun secara drastis namun bisa tetap mensejahterakan petani kedelai. Pemberian bibit unggul dan peningkatan luas lahan juga termasuk di dalam pelaksanaan kebijakan yang pro petani.

Selain sisi kebijakan, hal yang bisa kita lakukan sebagai orang Katolik ialah peningkatan kualitas produksi kedelai. Produksi tidak bisa dipisahkan dari sumber daya manusia dan teknologi. Sumber daya manusia berkaitan dengan petani kedelai. Peningkatan kualitas petani akan berdampak terhadap peningkatan kualitas produksi kedelai. Penerapan teknologi pertanian yang baik akan juga berdampak terhadap peningkatan kualitas produksi kedelai. Di sinilah peran kita sebagai orang Katolik, khususnya para akademisi yang memiliki tingkat pengetahuan yang memadai, dapat dipraktekkan dalam pengembangan masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada para petani tentang bagaimana meningkatkan kualitas produksi kedelai dan publikasi pada jurnal-jurnal ilmiah tentang penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan bisa diterapkan pada masyarakat petani.

Tidak terbatas pada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan maupun para akademisi. Siapa pun bisa ikut andil dalam menyelesaikan masalah ini. Bentuk keterlibatan kita bisa jadi berupa penghargaan terhadap petani lokal. Kita perlu membuang anggapan bahwa kualitas produk luar lebih baik dari pada kualitas lokal.

Akhirnya, apapun peran kita di masyarakat hendaklah kita tidak menutup mata terhadap permasalahan yang terjadi di bangsa kita dan selalu melemparkan semua kesalahan itu kepada pemerintah. Sebaliknya, hendaklah kita menjadi orang yang bisa memberikan sumbangsih kepada negara melalui bidang kita masing-masing. Dengan menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia, kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan adalah milik semua orang, milik semua warga negara Indonesia.

Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa.  
Merdeka untukmu, Merdeka untukku, Merdeka untuk kita semua!





## KEMERDEKAAN DAN KESADARAN PENDIDIKAN

Edy Suhardono

*“Essential Education isn’t about putting something new into children’s brains, but about letting them discover their true nature and their potential to do infinitely good things for themselves and for all living beings” — Lama Zopa*

**KESADARAN** tentang kemerdekaan seharusnya menjadi pemicu kesadaran tentang perlunya pendidikan sejati,<sup>1</sup> yakni pendidikan yang membuka mata pikiran, dan mendorong semangat melakukan pencarian tiada henti guna mengaitkan antara ide-ide, masalah, dan dunia nyata. Bagaimana Anda bisa belajar ilmu pertanian jika Anda tidak pernah pergi ke sawah dan berbicara dengan para petani? Bagaimana Anda bisa belajar teologi tanpa niat menelisik kisah kehidupan iman mereka yang tinggal di panti jompo, yang tidur di emper toko, atau yang bertahan hidup di dataran jati karang yang sulit ditanami jenis tanaman subsisten apa pun? Menghubungkan teori dengan pengalaman praktis, bahkan meski sekadar dilakukan dengan mewawancarai orang-orang marjinal seperti penggali pasir di lereng Merapi, sangat penting untuk pendidikan yang menyeluruh.

Pendidikan kita perlu memberi penekanan pada literasi ilmiah.<sup>2</sup> Memahami masalah ekologis utama di Indonesia membutuhkan pemahaman dasar tentang hal-hal seperti efek rumah kaca dan kebutuhan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Jika masyarakat umum tidak memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ekologi, bagaimana mungkin mereka dapat Anda berdayakan atau termotivasi untuk mengubah perilaku mereka yang dituduh merusak lingkungan?

Di atas segalanya, menurut hemat saya, kecintaan terhadap sesuatu harus memainkan bagian peran terbesar dalam pendidikan. Sukses tak diukur dengan kepemilikan rumah elite, mobil berkelas, atau *gadget* termutakhir. Sukses adalah kemampuan menjalani kehidupan dengan kecintaan di tengah perubahan dunia yang dapat menjadi macam apa pun. Sebab, pada galibnya, ikhwal mencintai sesuatu tidak cukup diajarkan, tapi perlu dibagikan sebagai penghayatan dan pengalaman. Jika kita tidak mampu membangun kecintaan, niscaya kita gagal mencintai diri kita sendiri,

masyarakat kita, "musuh" kita, ide-ide, buku, seni, dan keberagaman kehidupan; gilirannya kita mudah menyerah kalah.

Selain kecintaan, pendidikan juga perlu mendorong tumbuhnya kecerdasan jangka panjang yang tak egosentrik dan tak bermedan pandang myopik. Pendidikan perlu menumbuhkan kemampuan dan kepekaan melihat keterkaitan satu sama lain baik antara manusia dan alam, maupun antara budaya lain dan budaya sendiri. Kita perlu memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana dunia ini bekerja; sehingga pendidikan harus bersambung, dan berhubungan, dengan dunia nyata; harus memberdayakan manusia agar mampu mencintai, bertindak bijaksana, dan menjadi warga penuh kasih aktif kepada sesamanya.

### Keniscayaan Pendidikan Sejati

Tanpa pendidikan, orang rentan diperdaya oleh yang lebih kuat. Petani buta huruf bisa dihalau dari tanah mereka oleh pihak yang memiliki akses ke perangkat hukum. Perempuan, yang tidak memiliki akses ke keragaman sudut pandang, mungkin menerima mentah kesewenang-wenangan suaminya. Tanpa pendidikan, orang dibatasi untuk hanya mengerjakan pekerjaan kasar. Tanpa pendidikan, orang cenderung terpinggirkan, tertindas, terbatas dalam sumber daya baik untuk menolak ketidakadilan yang mereka derita, maupun menuntut hak mereka. Jadi, pendidikan tampaknya menjadi poros perkembangan manusia.

Takkan muncul ide-ide baru tanpa pikiran berpendidikan. Pendidikan adalah kekuatan pendorong vital perubahan dunia. Pendidikan, apalagi yang sejati (yang tidak selalu sama dengan sekolah), niscaya membawa pemberdayaan. Ini tidak hanya membuka pikiran terhadap wawasan lebih lanjut, tetapi juga membuka



jalan memperoleh kemampuan berharga lainnya. Pendidikan memiliki nilai lebih luas dan lebih dari sekadar membuka kesempatan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan kekuatan produktif dari yang mengenyamnya atau keluarga mereka.

Pendidikan menjawab kebutuhan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi baru, menerima tanggung jawab melestarikan lingkungan, dan memastikan banyak hal, seperti: ada tidaknya cara hidup demokratis, inisiatif karyawan di tempat kerja, keterampilan kooperatif, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah dengan perspektif beragam. Untuk secara signifikan meningkatkan kemampuan sekaligus memenuhi kebutuhan semua siswa menghadapi perubahan dunia yang sistemik; tujuan pendidikan pun harus sistemik, yakni pendidikan yang lebih baik dari apa yang saat ini ada, pendidikan yang dapat menciptakan perubahan sistemik dari waktu ke waktu.

Amartya K. Sen<sup>3</sup> mengidentifikasi tiga cara berbeda, yang di dalamnya kita dapat melihat pentingnya pendidikan untuk perluasan kemampuan. Pertama, pendidikan memenuhi peran sosial instrumental, di mana literasi dapat mendorong debat publik dan dialog tentang pengaturan sosial dan politik, misalnya. Kedua, pendidikan memiliki peran penting dalam proses memfasilitasi kemampuan kita untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga, masyarakat, atau nasional. Dan ketiga, pendidikan memiliki peran pemberdayaan dan distributif dalam memfasilitasi kemampuan yang kurang beruntung, kelompok marjinal dan dikesualikan; untuk mengorganisasi diri secara politik karena, tanpa pendidikan, kelompok-kelompok ini tidak akan mampu untuk mendapatkan akses ke pusat-pusat kekuasaan dan mendesak proposal redistribusi. Artinya, pendidikan memiliki efek redistribusi antara kelompok sosial, rumah tangga, dan dalam keluarga. Secara keseluruhan, pendidikan memiliki dampak antarpribadi karena orang dapat menggunakan kemanfaatan pendidikan untuk membantu orang lain serta diri mereka sendiri, dan karena itu dapat berkontribusi untuk mengusahakan kebebasan demokratis masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, terkait kemerdekaan, kesadaran dan perhatian pada pendidikan sejati merupakan cara mengembangkan kemampuan untuk “hidup lebih bebas dan lebih berfaedah”. Hal ini menuntut kita untuk berurusan dengan konten pendidikan, efisiensi dalam

organisasi, dan penanganan beberapa masalah yang dihadapi peserta didik dengan kebutuhan yang beragam. Dengan menekankan pendidikan sebagai cara memungkinkan orang untuk hidup lebih bebas dan sepenuhnya, pendekatan ini niscaya memberi kontribusi signifikan bagi bidang pendidikan; terutama pada tekanannya yang mementingkan kemampuan untuk melakukan penalaran kritis atas kehidupan mereka dan masyarakat tempat mereka tinggal. Dalam karyanya yang lain, Sen<sup>4</sup> menekankan pentingnya pendidikan yang secara khusus mendorong refleksi kritis, kemampuan untuk berdebat, penalaran publik, dan memasukkan suara-suara kearifan lokal yang diabaikan.

### **Pendidikan yang Sistemik**

Pendidikan sejati mempersyaratkan perubahan sistemik. Perubahan sistemik memberi tempat pada hubungan timbal balik dan kesalingtergantungan antar bagian-bagian dari sistem pendidikan, dengan konsekuensi bahwa perubahan yang diinginkan dalam satu bagian dari sistem disertai oleh perubahan dalam bagian lain yang diperlukan untuk mendukung perubahan-perubahan yang diinginkan. Perubahan sistemik mengakui hubungan timbal balik dan kesalingtergantungan antara sistem pendidikan dan komunitasnya, termasuk orang tua, pengusaha, lembaga pelayanan sosial, organisasi keagamaan, dan banyak lagi, dengan konsekuensi bahwa semua pemangku kepentingan diberi kepemilikan yang aktif selama upaya perubahan.<sup>5</sup>

Untuk keberhasilan setiap proses perubahan sistemik, fasilitator—dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia yang sudah 67 tahun mengenyam kemerdekaan—harus membantu masyarakat mengembangkan visi dari sistem ideal pendidikan mereka, membantu para pemangku kepentingan membuat dan mengambil kepemilikan (*ownership*) dalam visi bersama sistem pendidikan baru dan membantu semua mengembangkan gairah untuk semangat baru mereka.<sup>6</sup> Fasilitator harus mempersiapkan atau mencari bahan berpotensi yang berguna untuk membantu mengajarkan konsep-konsep yang penting bagi keberhasilan upaya perubahan.<sup>7</sup>

Sejauh mana fasilitasi itu dikerjakan? Pada hemat saya, yang berlangsung selama ini justru hal sebaliknya. Praktik yang dilantunkan di kalangan para pembuat kebijakan pendidikan justru afirmasi keyakinan sebagaimana ditengarai Pajares.<sup>8</sup> Pertama, dalam pendidikan, keyakinan yang terbentuk dari awal cenderung diabadikan, misalnya tentang pentingnya pengalaman dan persekolahan. Kedua, pendidikan menjadi penjem-

batan untuk alih keyakinan, yakni melalui proses transmisi budaya. Ketiga, keyakinan bahwa pendidikan harus memprioritaskan apa yang diyakini karena keberhubungan antara keyakinan tertentu dan keyakinan lain. Keempat, sulitnya mengubah keyakinan tertentu ketika keyakinan ini sudah masuk ke dalam struktur keyakinan yang sudah mengerak. Kelima, sulitnya mengubah keyakinan ketika orang sudah memasuki masa dewasa. Keenam, fakta bahwa keyakinan sangat memengaruhi persepsi. Ketujuh, fakta bahwa keyakinan sangat memengaruhi perilaku. Kedelapan, keyakinan tentang perlunya pengajaran yang mapan melalui perkuliahan. Dan kesembilan, keyakinan dianggap memainkan peran kunci dalam mendefinisikan tugas dan memilih alat kognitif yang dapat digunakan untuk menafsirkan, merencanakan, dan membuat keputusan tentang tugas-tugas pendidikan.

Tinjauan Pajares menegaskan, kepercayaan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku dan pengorganisasian pengetahuan dan informasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur kepercayaan pembuat kebijakan pendidikan sangat penting terkait ikhtiar meningkatkan praktik mengajar karena mereka akhirnya memengaruhi perilaku keguruan di dalam kelas.

Sayangnya, keyakinan ini tidak nampak secara gamblang karena tertutupi oleh sikap, penilaian, pendapat, ideologi, nilai, teori, dan persepsi.<sup>9</sup>

Struktur kepercayaan guru dieksplorasi oleh Battista,<sup>10</sup> di mana ia mengungkapkan bahwa guru adalah kunci keberhasilan gerakan reformasi saat ini dalam pendidikan matematika Amerika Serikat. Dia menegaskan, sejumlah besar guru memiliki keyakinan tentang matematika yang tidak konsisten dengan cara mereka membimbing. Ketidaksihinggaan dalam struktur keyakinan akan menghambat upaya reformasi sehingga mencegah perubahan kurikulum. Oleh karenanya sangat penting untuk mempertimbangkan keyakinan guru mengenai upaya reformasi.

Di pihak penerima—para siswa dan mahasiswa—terjadi ragam realitas yang berseberangan dengan keyakinan para pembuat kebijakan pendidikan. Dalam bukunya *The Unschooled Mind*,<sup>11</sup> Howard Gardner menyatakan, mahasiswa memiliki berbagai jenis pikiran dan dengan itu mereka belajar, mengingat, melakukan, dan memahami dengan cara yang khas. Gardner menambahkan bahwa individu dapat melihat dunia melalui bahasa, berpikir musik, representasi spasial, analisis logika-matematika,

gerakan tubuh, pemahaman terhadap orang lain atau diri sendiri, dan pemikiran naturalis. Teori Gardner tentang kecerdasan jamak (*Multiple Intelligences*) memiliki struktur yang mendasari dan agak berbeda dari banyak teori tentang gaya belajar saat ini. Sedang menurut Thomas Armstrong,<sup>12</sup> teori kecerdasan jamak adalah model kognitif yang bertujuan menggambarkan bagaimana individu menggunakan kecerdasan mereka untuk memecahkan masalah. Kecerdasan jamak berkorelasi dengan model gaya belajar, sementara Gardner lebih menekankan pada bagaimana pikiran manusia memperlakukan isi dunia. Pada model gaya belajar, tekanannya ialah pada orientasi proses. Sebagai contoh, dalam model “*sensoric-channel*” (visual-auditori-kinestetik), seorang yang tuli mungkin saja sangat musikal atau yang buta memiliki kecerdasan spasial. Tegasnya, kecerdasan jamak tidak terikat pada indra.<sup>13</sup>

### Manifesto Praksis

Menetak pada ikhwal melakukan pemihakan pada pendidikan sejati, yang melek realitas, yang mengait dengan dunia nyata, yang berorientasi pada kecintaan, yang berkecerdasan jangka panjang, yang berpandangan luas, dan yang memberdayakan; dalam skala dan jangkauan sumber daya yang tersedia, saya harus memilih antara menerapkan pendekatan makro, struktural, dan beranah publik atau pendekatan antara mikro-meso, nirstruktural, dan beranah privat.

Risalah ini adalah manifesto praksis dari refleksi pribadi saya selama 27 tahun bereksperimen tentang pembangunan manusia Indonesia pada skala personal, di mana saya memilih berdiri di tebing pendekatan yang kedua. Setelah secara personal merdeka dari posisi sebagai pegawai pada tahun 2004, saya membangun PT IISA VISI WASKITA dengan merek layanan IISA *Assessment, Consultancy & Research Centre*. Melalui “kendaraan” ini saya diperkenankan oleh semesta untuk merekomendasikan kepada sekitar 17 ribu manusia Indonesia baik melalui koridor layanan personal, familial, komunitas, dan organisasi profit dan nonprofit; sehingga menemukan kekhasan mereka sebagai ciptaan-Nya.

Saya meyakini, dengan mengenali kekhasan, ketalentaan, dan misi keterciptaan mereka di tengah semesta, manusia Indonesia dapat menemukan jenis peran sosial instrumental apa yang tepat untuk dibawakan, arah partisipasi pengambilan keputusan macam apa yang dapat dilakukan di tingkat rumah tangga, masyarakat, atau nasional; dan cara bagaimana seharusnya mereka

mengorganisasi diri secara politik dan mendapat akses ke pusat-pusat kekuasaan.

Jumlah 17 ribu klien yang berhasil saya layani dengan kendaraan lembaga ini selama 7 tahun mungkin tidak berbanding dengan jumlah 225 juta manusia Indonesia; dan sama sekali tidak berarti apa pun dilihat dari takaran

jumlah. Namun, saya meyakini, perubahan besar lebih sering diawali dengan anomali yang remeh, radikal, dan sistemik. *Magnum mutatio coepi a parva mutatio, parva mutatio, tamen parva; erit creare magnum mutatio* (Perubahan besar dimulai dari perubahan kecil, perubahan kecil, sekecil apa pun; akan menciptakan perubahan besar). ♦

<sup>1</sup> Musetude menyandingkan secara diametral antara pendidikan dengan pendekatan “top-down” dan “pendidikan sejati”: .... “It is based on the realization that each person is a genius, and for the first time discloses a system that can help people across the world, move from their lower cognitive processes to higher ones, in a precise, objective, measurable and repeatable manner. It is thus the most fundamental invention for humanity, helping it to evolve en masse to its true, unlimited capacities as humans.” Lihat *Education system to stimulate genius in every learner*, Online Document: <http://www.musetude.com/changing-education.html> (Diakses 14 Juli 2012, pk. 11.25).

<sup>2</sup> Dalam risalahnya berjudul: *Science Education as/for Participation in the Community*, Wolff-Michael Roth, dan Stuart Lee (*Paper*, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada, 2003) menjelaskan “literasi ilmiah” atau “melek ilmiah” sebagai pendidikan yang mempertimbangkan tiga alternatif asumsi. Pertama, literasi ilmiah adalah keadaan dari situasi kolektif yang mencirikan interaksi dengan “Kerumitan Tak Teruraikan” pada karakteristik individu. Kedua, sains bukan kerangka normatif tunggal bagi rasionalitas tetapi hanya salah satu dari banyak sumber daya yang dapat digunakan orang dalam proses pembuatan keputusan sehari-hari. Ketiga, literasi ilmiah membuat lebih menemukan akal ketika harus mengatur lingkungan belajar yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan melalui berpartisipasi dalam, dan memberikan kontribusi, bagi kehidupan masyarakat mereka, bahkan membuka kemungkinan dan potensi untuk melakukan partisipasi dan pembelajaran seumur hidup.

<sup>3</sup> Lihat Amartya K. Sen, A., *Inequality reexamined* (Oxford: Oxford University Press, 1992).

<sup>4</sup> Lihat Amartya K. Sen, “Human Rights and Capabilities,” (*Journal of Human Development*, 6(2), 2005), 151–66).

<sup>5</sup> Lihat Jenlink, P. M., Reigeluth, C. M., Carr, A. A., & Nelson, L M., “An expedition for change: Facilitating the systemic change process in school districts,” (*TechTrends*, 41(1), 1996), 21–30).

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Chandra Hawley, “Systemic Change in Education. A Road Map.” (*Educational Technology*. Vol 37. No. 6., 1997), h. 57–64.

<sup>8</sup> Lihat M.F. Pajares, “Teacher’s beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct.” (*Review of Educational Research*, 62 (3), 1992), 307–332.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lihat M. T. Battista, “Teacher beliefs and the reform movement in mathematics education.” (*Phi Delta Kappan*, 75 (2), 1994), 462–470.

<sup>11</sup> Lihat Howard Gardner, *The unschooled mind: how children think and how schools should teach*, (New York: Basic Books, 1991).

<sup>12</sup> Lihat Thomas Armstrong, “Multiple Intelligences: Seven Ways to Approach Curriculum” (1994), Online Document: [http://www.thomasarmstrong.com/articles/7\\_ways.php](http://www.thomasarmstrong.com/articles/7_ways.php). Diakses 14 Juli 2012, pk 17.25.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Ditulis khusus guna menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-67 sebagai kesempatan yang diberikan oleh Redaksi Jurnal Bhumiksara.

Penulis merupakan Bhumiksarawan, berkarya sebagai Direktur IISA Assessment, Consultancy & Research Centre. Website: <http://visiwaskita.com>. Email: [iisa@visiwaskita.com](mailto:iisa@visiwaskita.com).





## LSM Mendukung Masyarakat Merdeka Seutuhnya!

Dominiria Hulu

### Kondisi Awal

**PULAU** Nias merupakan kepulauan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan kondisi permasalahan yang beragam, diantaranya infrastruktur, perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Empat hal ini menjadi pilar utama yang sering menjadi permasalahan di Kabupaten Nias sekaligus menjadi ancaman dan tantangan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Nias.

Kondisi infrastruktur yang buruk menjadikan kehidupan masyarakat sangat terbelakang, di antaranya berakibat pada ketidakmampuan memasarkan hasil perkebunan/perikanan, memperoleh informasi, dan sebagainya. Selain itu kondisi perekonomian menjadi catatan utama miskinnya hidup, kurangnya kreatifitas, hanya bergantung pada satu bidang saja yaitu pertanian karet. Dalam kondisi pendidikan, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya sarana yang memadai, baik berupa sarana fisik (gedung sekolah, ruang kelas, alat bantu belajar) maupun sumber daya tenaga pengajar yang berkualitas.

Di bidang kesehatan, angka kematian Ibu dan anak masih menjadi masalah utama. Ibu hamil dan menyusui, serta anak balita menjadi kaum rentan akibat biaya kesehatan yang mahal, akses rumah sakit yang sangat jauh, posyandu dan puskesmas yang tidak berfungsi, hingga penggunaan jasa dukun untuk proses persalinan akibat kualitas pelayanan bidan desa kurang maksimal. Semua ini mengakibatkan keluarga khususnya anak-anak terancam kesehatannya, akibat gizi buruk, bahkan meninggal dunia ketika menderita penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah secara sederhana, contohnya diare dan demam.

Tidak dapat kita pungkiri, banyak rumah di balik gunung, di tengah hutan, bahkan yang hampir dekat di tengah kota yang sangat rentan tidak merasakan nikmatnya kata-kata kemerdekaan. Hal ini yang kemudian menyebabkan

mereka sangat kentara dengan buta huruf, takut terhadap orang luar, tidak berani bersuara/memutuskan apa yang menjadi hak mereka bahkan cenderung membedakan pendidikan anak perempuan dan laki-laki. Mereka cenderung menutup diri dalam segala hal, menganggap semua proses hidup terbatas pada “masa lalu” mereka, yang sudah menjadi sebuah kebiasaan turun temurun.

### Kehadiran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Kejadian Tsunami 26 Desember 2004 dan Gempa Bumi 28 Maret 2008, mengakibatkan beberapa wilayah di Nias mengalami berbagai kerusakan baik segi fisik maupun mental masyarakat. Seperti diketahui, berbagai upaya tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung besar-besaran sesudah itu oleh berbagai lembaga, baik dari nasional hingga internasional.

Beberapa dampak dari kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional di Nias telah membuka akses jalan yang selama ini buruk, meningkatkan akses masyarakat memperoleh informasi dari luar dan juga memasarkan hasil pertanian yang dimiliki. Pembangunan perumahan bagi yang kehilangan rumah memberikan kemerdekaan fasilitas yang dahulunya rumah hanya dari kayu beratap rumbia, tidak ada listrik, sekarang diberi perumahan yang tahan gempa, permanen dan ada akses PLN.

Selain itu, pembangunan sekolah mempermudah akses anak-anak di desa untuk mendapatkan pendidikan, setidaknya hingga bisa tamat dari tingkat SMA. Pembangunan sarana air bersih meningkatkan akses masyarakat untuk menikmati air bersih agar terhindar dari penyakit. Adanya berbagai pelatihan-pelatihan di bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Peningkatan kapasitas berupa pelatihan di bidang pertanian meningkatkan pengetahuan untuk menambah kesejahteraan hidup selain karet. Sedangkan peningkatan kapasitas Guru dan pemerhati pendidikan di desa (Tokoh



Agama/adat dan tokoh perempuan) membawa perubahan signifikan bagi anak, dalam hal prestasi dan kreatifitas anak. Sedangkan perubahan dalam bidang kesehatan, lebih kepada penguatan kapasitas Kader Posyandu dan Bidan sebagai pintu utama dalam meminimalkan permasalahan kesehatan di desa-desa yang tidak terjangkau akses puskesmas dan Rumah sakit.

Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah semua hal yang diberikan oleh LSM tersebut sudah membawa kemerdekaan yang utuh bagi masyarakat yang mereka dampingi?

### Refleksi kehadiran LSM di Pulau Nias

Berkecimpung di dunia LSM sejak SMA membuat saya mengalami banyak perubahan dalam pola pikir saya sendiri maupun masyarakat di lokasi dampingan saya. Menurut pandangan saya, kehadiran LSM dapat membuat masyarakat merdeka dan mampu menikmati “sesuatu” hal seperti yang dinikmati orang-orang kaya yang selama ini berkuasa atas mereka. LSM membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat di Nias, tidak saja di masyarakat terpencil namun juga hingga masyarakat di perkotaan. Banyak masyarakat yang selama ini belum terbuka matanya akan akses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi, akhirnya bisa memperoleh akses tersebut dengan mandiri.

Selain itu, dari segi adat, nilai ekonomi ‘jujuran’ yang sejak dulu menjadi ‘beban’ bagi setiap lelaki Nias yang hendak menikah, sekarang ini perlahan-lahan sudah tidak menjadi masalah besar. Sudah banyak kesadaran-penyadaran yang dilakukan LSM bersama Gereja, tokoh adat, dan tokoh masyarakat tentang pentingnya penyederhanaan nilai ekonomi ‘jujuran’, tanpa mengurangi makna nilai budaya dari jujuran itu sendiri.

Kehadiran LSM yang mengunjungi dan membantu masyarakat telah membawa nuansa baru dalam hidup mereka. Mereka merasakan kepedulian tinggi dari lembaga-lembaga tersebut, mendapatkan perhatian yang mungkin terlupakan oleh pemerintah, karena terlalu sibuk dengan persoalan pemerintahan “diri”. Hal inilah yang

kemudian memunculkan semangat mereka ketika LSM datang, bersedia berdiskusi dan berpendapat sesuai dengan konteks permasalahan yang mereka alami. Masyarakat mulai memiliki keberanian untuk mencurahkan aspirasi, walaupun terkadang masih tersendat-sendat karena motto beberapa orang: “kalau masih bisa dipersulit, *ngapain* dipermudah”.

Permasalahan lainnya adalah beberapa LSM tidak memiliki fokus yang memandirikan masyarakat. Beberapa LSM hanya fokus memberikan bantuan, bantuan, dan bantuan, terutama bantuan fisik, tanpa terlebih dahulu mengetahui konteks dan situasi yang tepat bagi masyarakat dampingannya. Ketika bangunan fisik tersebut rusak, tidak ada kemauan dan kemandirian dari masyarakat untuk merawat dan menjaganya. Akibatnya, tidak ada rasa memiliki dari masyarakat akan hasil dampingan LSM, sehingga dampak program LSM tidak berkelanjutan.

Walaupun demikian, kutipan *God presence and work* menguatkan keyakinan saya bahwa lambat laun masyarakat yang bermitra dengan LSM dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perencanaan dan keinginannya akan mampu menjadi masyarakat yang berkembang, mandiri, dan tidak mudah diombang-ambing. Mereka akan menikmati kemerdekaan yang seutuhnya, dari segi bermasyarakat, beragama, berpendidikan, berkesejahteraan ekonomi, dan sebagainya. Mereka akan melanjutkan perjuangan LSM bagi mereka, pasti!

Pertanyaan sekaligus tantangan bagi kita sekarang adalah, apakah kita, bersama LSM yang ada, mampu memperjuangkan masyarakat hingga mereka mandiri dan merdeka seutuhnya? Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar kita. Berdayakan mereka dengan kemampuan yang kita miliki baik sebagai seorang guru, peneliti, pengusaha, dan sebagainya. “Secuil ilmu” yang mereka peroleh dari kita, dapat menjadi “modal” bagi mereka untuk merdeka seutuhnya dari kungkungan “masa lalu” yang menjerat mereka. Semoga.





## EKONOMI SUMBER DAYA HAYATI UNTUK INDONESIA

Abdi Christia

**INDONESIA** memiliki potensi yang besar untuk menjadi sejahtera. Republik ini terdiri dari belasan ribu pulau yang terbentang di sabuk khatulistiwa, banyak di antaranya memiliki gunung berapi. Kombinasi dari wilayah kepulauan, iklim tropis, dan tanah vulkanik yang relatif muda memberikan kesuburan alam yang luar biasa. Kombinasi itu juga memberi Indonesia keragaman hayati yang sangat tinggi, hanya nomor dua setelah Brasil dengan hutan Amazonnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, sungguh masuk akal bila Indonesia membangun ekonomi berbasis sumber daya hayati.

### Mengintip Dunia

Tapi bukankah ada negara sukses yang ekonominya tidak dibangun dengan sumber daya hayati, Singapura misalnya? Benar, globalisasi memang telah mengaburkan betapa pentingnya pengembangan sumber daya hayati lokal. Hampir semua jenis bahan pangan dan bahan baku industri dapat diimpor dari negara lain, bahkan yang letaknya sangat jauh sekalipun. Tapi, fenomena ini tak akan berlangsung selamanya. Dunia kita sedang berada dalam masa perubahan yang begitu cepat. Kita tidak bisa bergantung pada negara lain untuk memasok kebutuhan kita, terutama kebutuhan pokok seperti pangan dan energi.

Mari kita melihat sekilas keadaan pangan dunia. Di sisi konsumsi, saat ini ada lebih dari 7 milyar manusia yang harus makan setiap hari. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah menjadi 10 milyar pada akhir abad ini<sup>1</sup>. Meningkatnya pendapatan ikut mengubah pola konsumsi masyarakat. Contohnya, konsumsi daging di negara Cina saat ini dua kali lipat konsumsi daging di Amerika Serikat<sup>2,3</sup>. Padahal, produksi daging butuh sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan produksi pangan asal tumbuhan. Keadaan di sisi produksi jauh dari menggembirakan. Modal utama dalam pengembangan sumber daya pengembangan sumber daya hayati adalah tanah yang subur, tapi praktek pertanian modern telah

telah menyebabkan erosi tanah besar-besaran<sup>4</sup>. Hal ini diperburuk lagi dengan menurunnya ketersediaan air bersih dan cuaca ekstrem karena perubahan iklim<sup>5</sup>. Keseimbangan neraca pangan dunia sedang berubah di depan mata kita.

Bagaimana dengan energi? Ekonomi dunia modern terus dibangun dengan energi fosil walau ada dua masalah besar menghadang. Pertama adalah makin menipisnya cadangan energi fosil, terutama minyak bumi sebagai bahan bakar cair untuk transportasi. Produksi minyak bumi dunia sudah melewati puncaknya<sup>6</sup>. Kedua adalah emisi gas rumah kaca hasil pembakaran bahan bakar fosil yang sudah memicu perubahan iklim bumi. Artinya, ekonomi energi terbarukan harus segera menggantikan ekonomi energi fosil yang ada sekarang.

### Melihat Indonesia

Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi semua kebutuhan pangan dan energi dari pengembangan sumber daya hayati nasional. Pertama, Indonesia terletak di khatulistiwa, artinya potensi produksi biomassa tumbuhannya termasuk yang paling tinggi di dunia. Kedua, Indonesia memiliki banyak penduduk, sumber daya yang sangat diperlukan dalam ekonomi berbasis sumber daya hayati. Saat ini kita punya cukup ilmu pengetahuan untuk merancang strategi yang bahkan dapat lebih baik daripada alam sendiri. Saat ini kita punya akses terhadap segala jenis tumbuhan, hewan, dan teknologi yang ada di dunia yang dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya hayati.

Tapi, sepertinya pemerintah Indonesia tidak berkomitmen mengembangkan sumber daya hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian terus mengurangi potensi produksi pangan dan energi, terutama di daerah padat penduduk. Izin perusakan hutan untuk perkebunan kelapa sawit terus dikeluarkan, yang artinya keragaman hayati hutan hujan tropis diganti dengan kebun monokultur yang merusak ekosistem. Bahkan pemerintah

tidak terlihat mendengarkan laporan FAO yang menyatakan praktek pertanian skala kecil, berbasis komunitas, dan memperhatikan ekologi lebih berhasil daripada pertanian konvensional, terutama di daerah tropis<sup>7</sup>. Kita perlu mencari alternatif untuk pengembangan sumber daya hayati yang lebih baik.

### Belajar dan bekerja

Banyak hal yang dapat dipelajari dari contoh yang baik. Saya ingin menceritakan kisah salah satu pahlawan yang saya kagumi, Willie Smits. Willie adalah warga negara Indonesia kelahiran Belanda yang dikenal melalui kiprahnya dalam Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) dan Yayasan Masarang. Berawal dari keprihatinan terhadap nasib orangutan di Kalimantan, Willie dan timnya mengusahakan suaka orangutan di sebelah utara Balikpapan dan mengajak warga lokal berperan aktif. Proyek itu diberi nama Samboja Lestari<sup>8</sup>. Mereka merancang dan mengerjakan proyek di padang ilalang yang dulunya hutan, dan dalam waktu singkat mengembalikan lahan itu menjadi hutan. Warga bertani, beternak, dan menyadap nira dari banyak pohon aren yang sengaja ditanam di sana. Nira kemudian difermentasi dan disuling, dengan demikian warga bisa mendapatkan bahan bakar memasak dan transportasi tanpa harus menebang pohon. Hutan dengan 70 pohon aren per hektar dapat menghasilkan 24.000 liter etanol per tahun<sup>9</sup>. Hutan aren berbeda dengan kebun sawit yang monokultur, hutan aren dapat dipenuhi dengan pohon buah atau kayu yang dapat menghasilkan produk

yang dibutuhkan manusia. Selain untuk dijadikan alkohol, nira dapat dipekatkan menjadi sirup atau dikristalkan menjadi gula aren yang lebih menyehatkan bila dibandingkan dengan gula tebu. Ada kelebihan lain dari sistem hutan aren yaitu penyadapan nira harus dilakukan oleh manusia dan tidak dapat dimekanisasi. Artinya ada lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Masih banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari karya Willie Smits dan timnya. Saya mengajak pembaca untuk melihat sendiri tautan-tautan yang ada di akhir artikel.

Berbicara lebih lanjut mengenai desain dan strategi dalam pengembangan sumber daya hayati, saya sangat menganjurkan sebuah ilmu desain yang bernama *permaculture*<sup>10</sup>. Konsep ini dikembangkan oleh Bill Mollison dan David Holmgren dari Australia sejak tiga dekade yang lalu. *Permaculture* adalah sebuah ilmu desain yang komprehensif, menghubungkan semua pengetahuan dan teknologi yang ada untuk mewujudkan habitat manusia yang lestari. Sampai saat ini sudah banyak sekali contoh proyek demonstrasi *permaculture* yang ada di dunia. Gerakan *permaculture* dilakukan melalui pendekatan positif, artinya daripada menyesali kerusakan hutan lebih baik menumbuhkan hutan yang lebih baik dari sebelumnya. Daripada menunggu pemerintah melakukan sesuatu, lebih baik kita memulainya sendiri. Saya pikir itu adalah pendekatan paling tepat bagi pengembangan sumber daya hayati di Indonesia sekarang.

### Referensi

1. United Nations. 2010. World Population Prospects, The 2010 Revision. <http://bit.ly/P938EL>
2. Larsen, J. Meat Consumption in China Now Double That in the United States. <http://bit.ly/P91Qtl>
3. Brown, L. 2011. Can The United States Feed China. <http://bit.ly/P93ZVT>
4. Brown, L. 2010. Eroding Soils and Shrinking Cropland. <http://bit.ly/P93fQo>
5. Brown, L. 2011. The Great Food Crisis of 2011. <http://bit.ly/P94oHR>
6. International Energy Agency. 2010. <http://bit.ly/R35Xuo>
7. Kent, R. 2011. The Need for Sustainable Agriculture. <http://bit.ly/OSsSCZ>
8. Smits, W. 2009. How to restore a rainforest. <http://bit.ly/NWCKtF>
9. Smits, W. 2011. The Amazing Power of Sugar Palms. <http://bit.ly/NWDm2c>
10. Permaculture Research Institute Australia. <http://bit.ly/xgfbOR>

Penulis merupakan penerima beasiswa Bhumiksara 2005, lulusan program S1 Universitas Gadjah Mada tahun 2009 dan S2 Universitas Gadjah Mada tahun 2012.





## KEBANGSAAN DARI SUDUT PANDANG UMAT BERIMAN

Mgr. A.M. Sutrisnaatmaka MSF

### 1. Pengantar

**MERAJUT** identitas kebangsaan rupanya tidak sesederhana seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Apalagi bagi negara Indonesia yang terdiri dari sekian banyak suku, agama, ras, adat dan kebudayaan. Di samping itu ada perbedaan yang cukup signifikan antara mereka yang tinggal di sekitar ibukota dan kota-kota besar lainnya yang relatif sudah lebih maju: ekonomi, pendidikan, kesehatan dan prasarana lainnya, dibanding dengan yang tinggal di luar Jawa, khususnya di pedalaman. Namun toh di sekitar kota-kota besar itu masih ada daerah kumuh, gedung sekolah hampir ambruk, jalan-jalan yang rusak, dan lain-lain. Kondisi ini menambah kompleksitas ruwetnya menentukan identitas dan nilai-nilai kebangsaan yang harus dibangun menjadi satu Indonesia yang bisa merangkul semua penduduknya. Lalu bagaimana bisa merajut nilai kebangsaan, dan apa peranan umat beriman di dalamnya?

### 2. Kesepakatan *Founding Fathers* dan Pancasila

Identitas kebangsaan sudah dicanangkan melalui kesepakatan *founding fathers*, namun belum mewujudkan secara penuh. Ditinjau misalnya, dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Mahaesa, seharusnya umat beriman bisa memberi kontribusi agar semakin terwujud identitas dan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Setiap agama memiliki ajaran-ajaran yang harus dipraktekkan di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang dihayati dalam setiap agama kiranya dapat menjamin adanya kebebasan pada setiap orang untuk menjalankan ibadah menurut agamanya sendiri, tanpa harus mengganggu pihak lain yang juga menjalankan agamanya. Setiap umat beriman dalam pelbagai agama semestinya dapat juga bersatu dalam usaha kemanusiaan, seperti halnya: membantu siapa saja yang miskin, sedang ditimpa musibah, membutuhkan biaya pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana transportasi, dan lain-lain. Pendek kata, untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, setiap

warga negara perlulah meningkatkan martabat kemanusiaannya sendiri.

Dalam mewujudkan identitas dan nilai-nilai kebangsaan, meski sudah merdeka selama 68 tahun, ternyata di tengah masyarakat masih terasa adanya macam-macam kerapuhan dan banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, atau yang mau memaksakan ideologi agamanya sendiri, dan terjadinya konflik horisontal maupun vertikal, menjadi indikasi betapa rapuhnya kesatuan identitas kebangsaan yang sedang kita bangun bersama. Ada banyak ketimpangan dalam mewujudkan negara kesatuan berbasis kebangsaan, seperti: pembagian pendapatan antara daerah dan pusat yang dirasa belum menunjukkan keadilan, maraknya korupsi yang semakin terkuak dari anggota DPR (Pusat maupun Daerah), petugas pajak, penegak hukum, dan lain-lain., terjadinya praktek politik berbasis uang pada Pemilu, yang juga melibatkan anggota keluarga dan kroni-kroni. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan patut dipertanyakan.

Kesepakatan *founding fathers* untuk menjadikan Indonesia berbangsa, berbahasa, dan bernegara satu, dengan dasar negara Pancasila, seharusnya sudah bisa menjadi jaminan yang kuat dalam mewujudkan identitas kebangsaan dan mengejawantahkan nilai-nilainya, yaitu meningkatkan martabat manusia. Lalu di manakah letak ketidakberesannya sehingga bangsa ini terpuruk dan terperangkap dalam krisis multi dimensi yang tak kunjung berakhir? Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan kita perlu mendeteksinya secara cermat.

### 3. Beberapa Indikasi Bisa Kita Jadikan Masukan

Ada sejumlah faktor yang menantang kita untuk berefleksi, utamanya sebagai umat beriman, yang menganut suatu agama di tengah masyarakat: apakah kita memberikan sumbangan, atau malah menjadi penghambat dalam proses terwujudnya identitas kebangsaan dan nilai-nilainya?



### 3.1. Toleransi dan Kerjasama, Wujud Kerukunan Umat Beragama

Hidup bersama dalam kemajemukan bisa menjadi berkat atau sebaliknya kutuk. Kemajemukan yang muncul dari suku, budaya, agama bisa memicu ketegangan dan konflik. Kemajemukan yang seperti inilah yang bisa menjadi kutuk bagi hidup bersama dan merongrong semangat kebangsaan. Sebaliknya, apabila masing-masing pihak saling menghargai dan melihat perbedaan sebagai unsur yang bisa saling memperkaya, maka kemajemukan itu bisa membawa berkat bagi semua pihak. Maka, diperlukan adanya sikap toleran, yaitu keterbukaan hati menerima yang sebagaimana adanya, hidup menurut keyakinan, dan menjalankan ibadah tanpa merugikan dan mengganggu sesamanya. Sikap toleransi, apalagi ditambah dengan kerjasama di bidang kemanusiaan, niscaya akan bisa meneguhkan kesatuan bangsa. Umat beriman dari agama mana pun kiranya bisa berkontribusi dalam membangun toleransi dan kerjasama yang saling meneguhkan ini.

### 3.2. Membangun Sikap dan Perilaku Adil Penuh Cinta Kasih

Sikap dan perilaku adil perlu diperjuangkan apabila hidup bersama mau diarahkan pada kebersamaan yang solid, kredibel dan tahan uji. Keadilan diperlukan untuk menunjang kehidupan yang harmonis. Dalam kehidupan yang harmonis itu, tiap kelompok dan perorangan memiliki peran yang berbeda-beda, namun bisa saling melengkapi, menunjang dan memperkaya kehidupan bersama. Membangun sikap dan perilaku adil sangat diperlukan sebagai modal dalam menunjang kehidupan yang stabil.

Bila kita cermati, setiap ketidakadilan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi orang lain. Perampasan hak atas tanah atau hak milik akan menjadikan orang yang dirampas haknya tersebut semakin miskin. Penggusuran akan menyebabkan pengungsian, dan pada gilirannya akan menyengsarakan korbannya. Perlakuan sewenang-wenang dalam masyarakat maupun dalam keluarga akan menimbulkan penderitaan bagi anggotanya. Putusan pengadilan yang memihak orang kaya atau yang berkuasa akan menyengsarakan kaum lemah tak berdaya. Begitu seterusnya, masih bisa ditambah deretan contoh-contoh di sekitar kita tentang perilaku tidak adil dan sewenang-wenang dengan segala akibatnya.

Untuk mengatasi ketidakadilan dan kesewenang-wenang

an itu diperlukan sikap dan perilaku yang adil penuh cinta kasih untuk semua pihak, dan bagi kesejahteraan semua orang. Dengan lain kata, tujuan berperilaku dan bersikap adil penuh cinta kasih itu ialah untuk memberi kesaksian bahwa setiap orang sama martabatnya di hadapan Allah dan harus dihargai secara sama dalam suasana persaudaraan penuh kasih.

### 3.3. Menggugat Budaya Korupsi

Dari sekian jenis “kebudayaan” dalam arti negatif, barangkali budaya korupsi menempati ranking tertinggi dan terpopuler. Dan dari tingkat kerumitannya, budaya inilah yang kiranya paling sulit untuk ditangani. Budaya korupsi di Indonesia menempati ranking tertinggi di Asia, dan tingkat penyebarannya pun sudah semakin merasuk ke semua lini dan tingkatan. Ada yang mensinyalir, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka tingkat pemerataan korupsi pun semakin meluas. Korupsi, kolusi dan nepotisme semakin subur dengan adanya otonomi daerah. Budaya korupsi tidak bisa dipisahkan dari budaya konsumerisme, individualisme, hedonisme dan materialisme. Banyak faktor yang turut andil mempengaruhi keterkaitan itu, tapi akhir-akhirnya semua berujung pada uang (uud: ujung-ujungnya duit). Dan untuk mendapatkan banyak uang dalam waktu yang singkat, jalan korupsi merupakan terabasannya yang diminati banyak orang. Akibatnya, rakyat menjadi sengsara, tidak sedikit anak menderita gizi buruk, banyak fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, dan sebagainya, dibiarkan rusak berat dan kurang terurus, karena dananya dikorupsi.

### Penutup

Setiap agama dapat berkontribusi untuk membangun identitas kebangsaan dengan nilai-nilai yang mencerminkan watak dan budaya keindonesiaan. Tokoh agama berperan besar untuk membawa umatnya bersikap menghargai dan toleran terhadap yang lain. Melalui kerjasama kemanusiaan, umat dari berbagai agama bisa merajut kesatuan bangsa. Penanaman nilai-nilai kejujuran melalui ajaran masing-masing, dan pengembangan sikap dan perilaku adil penuh cinta kasih kepada setiap pemeluk agama pasti akan berdampak untuk memberantas korupsi dan mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa. Semoga semakin bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia, semakin tampillah identitas kebangsaan dan keindonesiaan kita dengan taburan nilai yang mengedepankan martabat manusia yang beradab.

Palangka Raya, 30 Juli 2012

Penulis merupakan Uskup Palangka Raya





## CENDEKIAWAN KATOLIK INDONESIA DI TENGAH LIBERALISASI EKONOMI

Theo Sudimin

### Hakikat Ekonomi

**HAKIKAT** dari kegiatan ekonomi adalah proses pengelolaan semua sumber daya demi pencapaian kesejahteraan bersama dan apabila rumah tangga itu lingkungannya diperluas menjadi “negara-bangsa” maka tujuan ekonomi adalah kesejahteraan bersama seluruh warga negara-bangsa tersebut.

Tugas ekonomi adalah memberi alasan mendasar mengapa ekonomi perlu memfokuskan perhatiannya pada kesejahteraan bersama dan cara yang wajar untuk meningkatkan kekayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama tersebut. Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarahkan diri pada kebutuhan hidup manusia perorangan dan berjangka pendek saja, tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara.

Dalam pandangan Francois Quesney kesejahteraan bersama dicapai dengan cara mengatur kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan produksi maupun distribusi hasil-hasil pertanian melalui *sharing* di pasar.

### Keterlibatan Gereja dalam Permasalahan Sosial

Pandangan resmi Gereja Katolik tentang tata kehidupan sosial ekonomi pertama kali tertuang dalam Ensiklik *Rerum Novarum* dari Paus Leo XIII pada tanggal 15 Mei 1891. Ensiklik ini ingin menanggapi persoalan sosial terutama semakin kuat tumbuhnya sosialisme dan komunisme (marxisme) yang digerakkan oleh “nabi” Karl Marx (1818 – 1883) dan semakin kuat dan meluasnya kapitalisme liberal. Sosialisme dan komunisme itu tumbuh berkembang untuk merespon perkembangan ekonomi kapitalis liberal yang memunculkan banyak persoalan sosial terutama menyangkut kepentingan buruh yang banyak menjadi korban penindasan oleh kaum pemilik modal. Ketegangan antara dua ideologi besar kapitalisme dan sosialisme – komunisme mendorong Gereja untuk mempertegas sikapnya dan memberikan arahan bagi umat Katolik.

Dokumen ketiga yang membahas tentang keberpihakan Gereja terhadap permasalahan sosial ekonomi adalah

ensiklik *Mater et Magistra* dari Paus Yohannes XXIII yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1961. Hal baru dari ensiklik ini dibandingkan kedua ensiklik lainnya berkenaan dengan hubungan antar sektor ekonomi. Sektor yang mendapat perhatian Paus Yohannes XXIII adalah sektor pertanian. Gejala industrialisasi dunia diikuti dengan proses urbanisasi sehingga pedesaan dan sektor pertaniannya semakin ditinggalkan karena juga semakin tertinggal dari sektor industri. Maka Paus juga meminta kepada para penguasa negara untuk memperhatikan sektor pertanian pedesaan dan perlunya keseimbangan antar sektor-sektor ekonomi. Dan apabila mencermati perhatian Paus ini, kita semakin tersadarkan bahwa dewasa ini sektor keuangan dengan omset luar biasa besar justru semakin menguasai perekonomian, sementara sektor ini tidak menyentuh sama sekali kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kebanyakan.

**Konsili Vatikan II** (1962-1965) yang membuka pintu dan jendela Gereja untuk memandang jauh ke luar memberikan perhatian pada permasalahan sosial ekonomi pada dokumen Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*. Perekonomian memang mengalami kemajuan yang luar biasa, namun “kesejahteraan seluruh masyarakat” belum tercapai dan justru ketimpangan menjadi wajah dunia dimana “kemewahan berdampingan dengan keadaan yang menyedihkan” (GS 63).

Lebih lanjut konsili menegaskan bahwa perkembangan perekonomian harus didukung namun harus tetap diarahkan untuk melayani manusia dan harus tetap berada di bawah kendali manusia yang “bukan sekelompok kecil (yang sewenang-wenang), atau kelompok-kelompok yang terlampau berkuasa di bidang ekonomi, atau negara melulu, atau beberapa bangsa yang lebih berkuasa” (GS 65).

Pada masa kepausannya Yohannes Paulus II mengeluarkan beberapa ensiklik tentang keterlibatan sosial Gereja dan di dalamnya antara lain berkenaan dengan kehidupan sosial ekonomi. *Laborem Exercens* membahas tentang “kerja” dari perspektif iman. Kerja diarahkan agar manusia semakin dekat dengan Allah, Pencipta dan Penebus, dan ikut serta dalam rencana penyelamatan-Nya bagi manusia dan dunia. Kerja meru-

pakan hakikat dan bahkan kekhasan manusia untuk melaksanakan panggilan Allah mengolah dan membangun dunia dan kondisi hidupnya. Dalam rangka pembangunan dunia ini, kerja merupakan “kunci soal sosial” (Kieser, 1992).

#### **Keprihatinan dan Keterlibatan Gereja Katolik Indonesia**

Pada 2003 KWI mengeluarkan Nota Pastoral berjudul “Keadilan Sosial bagi Semua”, dan pada 2004 berjudul “Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadilan Sosial bagi Semua: Pendekatan Sosio-Budaya”, dan 2006 berjudul “Habitus Baru: Ekonomi yang Berkeadilan – Keadilan bagi Semua: Pendekatan Sosio – Ekonomi”. Nota Pastoral terakhir ini memberikan arahan keterlibatan Umat Allah dalam bidang ekonomi. Karena itu pokok-pokok Nota Pastoral disajikan dan sekaligus menjadi sarana bagi kita belajar dan berkiprah dalam masyarakat.

Nota Pastoral diawali dengan harapan para Uskup agar Nota Pastoral ini menjadi bahan “proses pembelajaran dan penghayatan iman dalam dimensi sosial-ekonomi” dan “...kerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik melangkah bersama menjadi pelopor dan penggerak berbagai usaha ekonomi berkeadilan yang menyejahterakan lingkungan sekitarnya” (No 3). Kegiatan ekonomi semakin menjauhkan masyarakat dari hakikat dasar ekonomi dan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan bersama. Kondisi perekonomian bangsa telah menghasilkan kesenjangan yang luar biasa sehingga begitu gampang mata melihat dua fenomena yang hadir berdampingan, yaitu wajah kemiskinan yang mendera sebagian besar rakyat dan “penumpukan kekayaan sekelompok orang yang memamerkannya tanpa kepedulian” (No 12).

Kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam antara lain disebabkan oleh: (1) Komersialisasi dalam berbagai aspek termasuk dalam kebijakan publik dan komersialisasi itu digerakkan oleh motor mekanisme pasar di mana kemampuan daya beli menjadi dasar dan menentukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu demi kebutuhannya; (2) Globalisasi seolah-olah memberikan harapan baru, namun sekaligus membuat “kebijakan ekonomi yang bertumpu pada aliran modal para investor asing mengandung risiko hidup-matinya kebanyakan warga biasa semakin tergantung pada kemauan pihak lain, dan bukan pada potensi ekonomi kebanyakan warga biasa sendiri” (No 14c).

Berdasarkan berbagai pemikiran yang juga mengacu data empiris dan analisis di atas para uskup merumuskan dua arah gerakan (No 17), yaitu: (1) usaha pemberdayaan potensi dan energi kaum miskin dan lemah dengan melibat

kan kaum cerdik-cendekia untuk mencari tata-kelola kehidupan ekonomi yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan bersama; (2) Desakan kritis kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi berskala besar untuk terlibat aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan perhatian khusus kepada mereka yang miskin dan lemah, tanpa membuat kaum miskin dan lemah itu justru tergantung.

Dengan menyadari maksud penciptaan dan inkarnasi Allah menjadi manusia (Yesus), Gereja Katolik Indonesia memperbarui komitmennya untuk mendorong kerja sama antara badan publik, kekuatan pasar, dan komunitas-komunitas warga guna menciptakan tata-kelola ekonomi yang berkeadilan dan menjadikan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Sikap yang perlu ditumbuhkan oleh dan dalam Gereja adalah pertobatan. Pertobatan itu diwujudkan dalam empat cara (No 27), yakni: (1) memperbarui tekad untuk bersama saudara-saudara yang miskin dan lemah terus menumbuhkan sikap berani memulai dengan kekuatan dan potensi yang ada tanpa tergantung pada inisiatif dari kekuatan ekonomi berskala besar; (2) mendorong mereka yang diberkati dengan kekuatan ekonomi besar agar lebih jujur dan seksama dalam mencari jalan untuk membantu kondisi hidup kaum miskin dan lemah tanpa menciptakan ketergantungan kaum miskin dan lemah itu; (3) mendorong serta mendesak para pembuat dan pelaksana kebijakan publik untuk berubah dari kecenderungan memperdagangkan jabatan dan mandat rakyat bagi keuntungan sendiri menuju keberanian membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang sungguh-sungguh berpihak kepada kaum miskin dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan merupakan hak setiap orang dan pemerintah beserta badan-badan publik berkewajiban menjaga dan memastikan pemenuhan hak tersebut; (4) mendorong para cerdik-pandai untuk aktif terlibat dalam mengkaji kembali dan mengubah gagasan serta cara-cara berpikir, terutama dalam bidang ekonomi, yang merugikan kaum miskin dan lemah guna menemukan gagasan dan cara berpikir serta bertindak yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai cita-cita utama.

Berdasarkan pembaruan komitmen dan pertobatan serta demi terwujudnya cita-cita membangun tata kelola ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan bersama, para Uskup memberikan beberapa prinsip (No 28), yaitu: (1) kesetaraan martabat manusia. Manusia adalah subjek, dasar, dan tujuan setiap kegiatan termasuk ekonomi. Setiap orang, terutama yang miskin

dan lemah, harus didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama; (2) kesejahteraan bersama. Tolok ukur pencapaian kesejahteraan bersama itu adalah mutu kehidupan warga masyarakat yang paling lemah. Apabila sebagian besar warganya yang paling lemah masih hidup dalam kemiskinan, masyarakat itu tidak sejahtera; (3) solidaritas, kesetiakawanan untuk bersama-sama melihat persoalan, mencari dan merancang jalan keluarnya, melaksanakan dan mengevaluasi menurut tolok ukur kesejahteraan bersama. Prinsip solidaritas adalah kekuatan warga untuk mengorganisir diri menjadi daya gerak sosial, ekonomi dan politik; (4) subsidiaritas, apa yang dapat dilakukan oleh unit-unit yang lebih kecil tidak boleh diambil-alih oleh unit-unit yang lebih besar. Dengan prinsip ini kekuatan ekonomi yang besar tidak mencaplok atau menyingkirkan usaha ekonomi mikro dan kecil yang dilakukan oleh kaum miskin dan lemah. Prinsip ini juga mendorong unit-unit ekonomi yang kecil untuk mengorganisir diri menjadi suatu kekuatan ekonomi yang mandiri.

Di tengah berbagai persoalan dan dinamika kehidupan, para uskup menawarkan prioritas dan beberapa langkah strategis. Prioritas gerakan ekonomi menuju kesejahteraan bersama adalah pemberdayaan potensi dan energi ekonomi rakyat. Kebijakan publik dan kerja sama dengan para pelaku ekonomi berskala besar diarahkan untuk pemberdayaan yang memandirikan dan bukan sebaliknya. Prioritas ini ditunjang dengan beberapa langkah (No 30), yakni: (1) gerakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat yang miskin melalui upaya-upaya yang membuat potensi dan energi ekonomi mereka muncul serta bergerak; (2) gerakan untuk memberdayakan kelompok-kelompok khusus di antara kaum miskin, yang secara ekonomi aktif dan yang mempunyai potensi serta energi untuk berkembang. Gerakan ini terutama pendidikan kewirausahaan dan pembentukan modal tanpa menggantungkan diri pada kekuatan-kekuatan ekonomi berskala besar maupun pemerintah. Misalnya adalah koperasi; (3) gerakan pendidikan dan pembentukan modal secara mandiri; (4) gerakan untuk mendesak prasarana sosial ekonomi yang seimbang di Indonesia, dengan memberi perhatian khusus pada pengembangan berbagai prasarana yang mendorong perkembangan ekonomi rakyat di daerah-daerah tertinggal; (5) gerakan untuk memantau arah kebijakan publik dalam bidang ekonomi agar semakin memberi perhatian khusus pada usaha member-

Dayakan potensi dan energi ekonomi kaum miskin dan lemah; (6) gerakan untuk memantau arah kebijakan publik, dengan perhatian khusus pada pelaksanaan tata-kelola yang baik dan pencegahan korupsi, kolusi serta jual-beli kebijakan publik; (7) gerakan bersama dengan mereka yang berkehendak baik dan semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha untuk membentuk jaringan usaha kecil dan mikro yang melatih serta menghadirkan lapangan kerja bagi masyarakat; (8) gerakan melestarikan lingkungan sebagai upaya ekologis yang tidak boleh diabaikan dalam usaha peningkatan kesejahteraan bersama.

Semua gerakan ini dapat menjadi gerakan yang andal dan berkelanjutan apabila didukung oleh gerakan cerdas-pandai yang terus menerus melakukan kajian kritis atas berbagai cara berpikir dan praktek berekonomi yang berlangsung dewasa ini. Tujuannya adalah untuk menemukan gagasan, cara berpikir, dan praktek ekonomi baru yang lebih berorientasi pada kaum miskin dan lemah serta kesejahteraan bersama.

### Penutup

Gereja Katolik Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi riil rakyat Indonesia mengambil sikap tegas untuk memihak (tanpa menganggap yang lain seperti pengusaha besar dan pemerintah sebagai lawan tetapi sebagai partner) rakyat miskin dan lemah yang jumlahnya sangat besar. Partisipasi para cerdas-cendekia sangat diharapkan oleh pimpinan Gereja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*) sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi.

Potensi dan energi ekonomi rakyat miskin dan lemah harus dibantu untuk diberdayakan sehingga mereka semakin sejahtera dengan usahanya sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Dalam pemikiran ini usaha kecil dan menengah serta penumbuhan semangat kewirausahaan menjadi amat penting untuk ditangani.

Dengan demikian tugas kita sebagai para cendekia sudah sangat jelas. Banyak praktek baik dapat menjadi referensi dan sarana belajar kita. Virus-virus pemihakan pada ekonomi rakyat miskin dan lemah perlu disebar-tularkan dulu. Pemberdayaan rakyat melalui usaha kecil dan mikro perlu didengungkan sambil merancang sesuatu yang konkret sesuai dengan situasi lingkungan kita masing-masing.

*Artikel ini merupakan hasil suntingan dari makalah yang dipresentasikan dalam Seminar bertajuk "Keterlibatan Umat Allah dalam Bidang Ekonomi: Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme" di Universitas Widya Mandala Madiun pada tanggal 2 Agustus 2009.*

*Penulis merupakan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.*







## ENSIKLIK BAPA SUCI BENEDIKTUS XVI

### Deus Caritas Est

#### Kekhasan Karya Kasih Gereja

31. **BERKEMBANGNYA** organisasi-organisasi berbeda yang terlibat untuk menjawab berbagai kebutuhan umat manusia pada dasarnya menunjukkan secara tepat kenyataan perintah kasih akan sesama adalah sesuatu yang ditanamkan oleh Pencipta di dalam hakekat terdalam manusia. Hal itu merupakan pula buah dari kehadiran Kristianitas di dunia, karena sejak semula Gereja Kristiani secara terus-menerus menghidupkan dan mewujudkan perintah ini, betapapun tidak jarang hal itu tidak terlihat jelas di tengah perjalanan waktu. Pembaharuan paganisme yang dicoba oleh Kaisar Yulianus Apostatus merupakan suatu contoh awal akan hal ini; di sini kita melihat bagaimana daya Kristiani berkembang meluas melampaui batas iman Kristiani. Karenanya, menjadi sangat penting bahwa karya kasih Gereja tetap mempertahankan semua sinar terang keluhurannya dan tidak hanya sekedar melaksanakan bantuan sosial belaka. Akan tetapi, apakah sebenarnya unsur dasar dari kasih Kristiani dan Gerejani?

a). Mengikuti contoh yang diberikan dalam perumpamaan tentang Orang Samaria yang murah hati, kasih Kristiani terutama adalah tanggapan seketika akan kebutuhan langsung dan akan situasi-situasi tertentu: memberi makan mereka yang lapar, memberi pakaian mereka yang telanjang, merawat dan menyembuhkan yang sakit, mengunjungi mereka yang berada dalam penjara, dan seterusnya. Organisasi-organisasi karitatif Gereja dimulai dengan Caritas (baik di tingkat keuskupan, nasional maupun internasional), harus melakukan dengan segala upaya dan daya untuk menyediakan sumber dana, namun terlebih personal yang dibutuhkan bagi karya tersebut. Pribadi-pribadi yang terlibat dalam karya pada mereka yang membutuhkan itu harus memiliki

kompetensi profesional: mereka telah terlatih sehingga tahu apa yang harus dibuat dan bagaimana menjalankannya, serta setia dalam komitmen untuk terus melayani. Namun betapapun kompetensi profesional sesuatu yang utama dan mendasar, hanya dengan itu saja tidaklah cukup. Kita berhadapan dengan pribadi manusia, dan pribadi manusia senantiasa membutuhkan sesuatu lebih daripada sekedar pelayanan teknis. Mereka membutuhkan kemanusiaan. Mereka membutuhkan perhatian penuh kasih. Mereka yang bekerja bagi organisasi pelayanan kasih Gereja harus pula memiliki tanda nyata bahwa mereka tidak hanya begitu saja melayani sesama yang membutuhkan secara instan, namun mendedikasikan dirinya bagi sesama dengan perhatian kasih, sehingga menjadikan mereka mampu mengalami kekayaan kemanusiaan mereka yang dilayaninya. Konsekuensinya perlu ditambahkan dalam persyaratan profesionalitas ini, pelayan kasih membutuhkan "pendidikan hati", mereka perlu dituntun untuk berjumpa dengan Allah di dalam Kristus, yang telah menumbuhkan kasih dalam diri mereka dan membuka hati mereka akan sesama. Kasih akan sesama bagi mereka, dengan demikian, tidak lagi suatu perintah yang tertanam dari luar, demikian bisa dikatakan, namun sebagai suatu konsekuensi yang tumbuh dari iman mereka, iman yang menjadi nyata melalui kasih (Lih. Gal. 5:6).

b). Karya kasih Kristiani harus bebas dari partai dan ideologi. Karya kasih bukanlah sarana untuk secara ideologis mau mengubah dunia, dan tidak pula melayani kepentingan strategis dunia, namun suatu tanda yang menghadirkan kini dan di sini kasih yang dibutuhkan umat manusia. Abad modern, terlebih

sejak abad 19, didominasi oleh berbagai versi filsafat perkembangan, dimana yang paling radikal adalah Marxisme. Salah satu bagian dari strategi Marxisme adalah teori pemiskinan: dalam situasi ketidakadilan kekuasaan, demikian dinyatakan, setiap orang yang terlibat dalam tindakan karitatif pada dasarnya melayani sistem yang tidak adil, sebagaimana hal itu tampak paling tidak sampai pada beberapa wujud yang masih dapat ditolerir. Hal ini perlahan menggerakkan suatu kemungkinan adanya revolusi, dan karenanya malahan menghalangi upaya perjuangan bagi dunia yang lebih baik. Tampak dalam cara ini, kasih ditolak dan dituduh sebagai sarana untuk melanggengkan status *quo*. Akan tetapi apa yang ada di sini, sepenuhnya adalah filsafat yang tak manusiawi. Orang-orang dewasa ini dikorbankan demi suatu *moloch* masa depan-masa depan yang perwujudannya secara efektif sangat diragukan. Seseorang tidak dapat membangun dunia menjadi semakin manusiawi dengan menolak tindakan manusiawi kini dan di sini. Kita memberikan sumbangan bagi dunia yang lebih baik hanya dengan secara personal dan konkret berbuat baik, dengan komitmen sungguh, dan kapan pun juga ada kesempatan untuk itu, bebas dari strategi dan program partisan. Program Kristiani – adalah program Orang Samaria yang murah hati, yang tak lain adalah program Yesus – adalah “hati yang mencari”. Hati mencari di mana kasih dibutuhkan dan diwujudkan di dalamnya. Tentu saja, ketika karya karitatif dijalankan oleh Gereja sebagai inisiatif komunitarian, spontanitas pribadi harus dipadukan dengan rencana, antisipasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa lainnya.

c). Kasih, lebih lanjut, tidak dapat digunakan sebagai sarana yang terkait dengan akan apa yang dewasa ini disadari sebagai proselitisme. Kasih itu bebas, tidak dibuat sebagai cara untuk menggapai tujuan lain<sup>1</sup>. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa karya kasih dengan berbagai cara dapat menanggalkan Allah dan Kristus. Senantiasa perhatian akan umat manusialah yang bekerja dalam karya kasih. Dan tidak jarang akar terdalam dari penderitaan adalah ketidakhadiran Allah. Mereka yang menjalankan karya kasih atas nama Gereja jangan sampai tidak mencoba untuk menanamkan iman Gereja pada sesama. Mereka menyadari bahwa kasih sejati dan cuma-cuma adalah kesaksian terbaik akan Allah, yang didalamnya kita percaya dan olehnya kita didorong untuk mengasihi. Orang Kristiani tahu waktunya kapan berbicara tentang Allah, dan kapan waktu untuk lebih baik tidak berkata apa-apa serta membiarkan kasih itu sendiri yang berbicara. Dia tahu bahwa Allah adalah kasih (lih. 1 Yoh. 4:8) dan kehadiran Allah dirasakan jika satu-satunya yang dibuat hanyalah kasih. Dia tahu – kembali pada pertanyaan yang muncul sebelumnya – bahwa penyangkalan akan kasih adalah penyangkalan akan Allah, dan pun akan manusia; dia mencoba melakukan sesuatu tanpa Allah. Konsekuensinya, pembelaan terbaik akan Allah dan manusia terletak persis di dalam kasih. Maka adalah tugas tanggung jawab badan pelayanan kasih Gereja untuk menumbuhkan kembali kesadaran ini pada para anggotanya, sehingga mereka dalam aktivitas-aktivitas mereka – baik dalam kata-kata, maupun dalam diam, dalam tindakan nyata – mereka menjadi saksi Kristus yang terpercaya.

<sup>1</sup> Lih. Congregation for Bishops, Directory for the Pastoral Ministry of Bishops Apostolorum Successores (22 February 2004), 196, Vatican City 2004, p. 216.

Artikel ini dikutip dari Ensiklik Bapa Suci Benediktus XVI kepada para Uskup, Imam dan Diakon, kaum Religius dan semua umat beriman tentang Cinta Kasih Kristiani, berjudul: *Deus Caritas Est*



## KONSTITUSI PASTORAL

### Gaudium Et Spes Tentang Masyarakat Manusia

#### 24. (Sifat Kebersamaan Panggilan Manusia dalam Rencana Allah)

**ALLAH**, yang sebagai Bapa memelihara semua orang, menghendaki agar mereka semua merupakan satu keluarga, dan saling menghadapi dengan sikap persaudaraan. Sebab mereka semua diciptakan menurut gambar Allah, yang “menghendaki segenap bangsa manusia dari satu asal mendiami seluruh muka bumi” (Kis 17:26). Mereka semua dipanggil untuk satu tujuan yang sama, yakni Allah sendiri.

Oleh karena itu, cinta kasih terhadap Allah dan sesama merupakan perintah yang pertama dan terbesar. Kita belajar dari Kitab Suci bahwa kasih terhadap Allah tidak terpisahkan dari kasih terhadap sesama”...sekiranya ada perintah lain, itu tercakup dalam amanat ini: “Hendaknya engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri ... jadi kepenuhan hukum adalah cinta kasih” (Rm. 13: 9-10; lih. 1 Yoh. 4: 20). Menjadi makin jelaslah bahwa itu sangat penting bagi orang-orang yang semakin saling tergantung dan bagi dunia yang semakin bersatu.

Bahkan, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya “semua orang menjadi satu ... seperti kita pun satu” (Yoh. 17: 21-22), dan membuka cakrawala yang tidak terjangkau oleh akal budi manusiawi, ia mengisyaratkan kemiripan antara persatuan pribadi-pribadi Ilahi dan persatuan putra-putri Allah dalam kebenaran dan cinta kasih. Keserupaan itu menampakkan bahwa manusia, yang di dunia ini merupakan satu-satunya makhluk yang oleh Allah dikehendaki demi dirinya sendiri, tidak dapat menemukan diri sepenuhnya tanpa dengan tulus hati memberikan dirinya.

#### 26. (Memajukan Kesejahteraan Umum)

Karena saling ketergantungan itu semakin meningkat dan lambat laun meluas ke seluruh dunia, maka kesejahteraan umum sekarang ini juga semakin bersifat

universal, dan oleh karena itu mencakup hak-hak maupun kewajiban-kewajiban, yang menyangkut seluruh umat manusia. Yang dimaksudkan dengan kesejahteraan umum ialah keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia.

Akan tetapi, serta-merta berkembanglah kesadaran dan unggulnya martabat pribadi manusia, karena melampaui segala sesuatu, lagi pula hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya bersifat universal dan tidak dapat diganggu gugat. Maka, sudah seharusnya bahwa bagi manusia disediakan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk hidup secara sungguh manusiawi, misalnya nafkah, pakaian, perumahan, hak untuk dengan bebas memilih status hidupnya dan untuk membentuk keluarga, hak atas pendidikan, pekerjaan, nama baik, kehormatan, informasi yang semestinya, hak untuk bertindak menurut norma hati nuraninya yang benar, hak atas perlindungan hidup perorangan, dan atas kebebasan yang wajar, juga perihal agama.

Jadi, tata masyarakat serta kemajuannya harus tiada hentinya menunjang kesejahteraan pribadi-pribadi; sebab penataran hal-hal harus dibawakan kepada tingkatan pribadi-pribadi, dan jangan sebaliknya menurut yang disyaratkan oleh Tuhan sendiri ketika bersabda bahwa hari Sabbath itu ditetapkan demi manusia, dan bukan manusia demi hari Sabbath. Tata dunia itu harus semakin dikembangkan, didasarkan pada kebenaran, dibangun dalam keadilan, dihidupkan dengan cinta kasih, harus menemukan keseimbangannya yang semakin manusiawi dalam kebebasan. Supaya semua itu terwujudkan, perlulah

diadakan pembaruan mentalitas dan perubahan-perubahan sosial secara besar-besaran. Roh Allah, yang dengan penyelenggaraan-Nya yang mengagumkan mengarahkan peredaran zaman dan membarui muka bumi, hadir di tengah perkembangan itu. Adapun rasi Injil telah dan masih membangkitkan dalam hati manusia tuntutan tak terkendali akan martabatnya.

### 29. (Kesamaan Hakiki antara Semua Orang dan Keadilan Sosial)

Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus, dan mengemban panggilan serta tujuan Ilahi yang sama pula. Maka, harus semakin diakuiilah kesamaan dasariah antara semua orang.

Memang karena pelbagai kemampuan fisik maupun bermacam-ragaman daya kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang disamakan. Akan tetapi, setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan, karena bertentangan dengan maksud Allah. Sebab, sungguh layak disesalkan bahwa hak-hak asasi pribadi itu belum di mana-mana dipertahankan secara utuh dan aman. Seperti bila

seorang wanita tidak diakui wewenangnya untuk dengan bebas memilih suaminya dan menempuh status hidupnya, atau untuk menempuh pendidikan dan meraih kebudayaan yang sama seperti dipandang wajar bagi pria.

Kecuali itu, sungguhpun antara orang-orang terdapat perbedaan-perbedaan yang wajar, tetapi kesamaan martabat pribadi menuntut agar dicapai kondisi hidup yang lebih manusiawi dan adil. Sebab perbedaan-perbedaan yang keterlaluan antara sesama anggota dan bangsa dalam satu keluarga manusia di bidang ekonomi maupun sosial menimbulkan batu sandungan, lagi pula berlawanan dengan keadilan sosial, kesamarataan, martabat pribadi manusia, juga merintang keadilan sosial dan internasional.

Adapun lembaga-lembaga manusiawi, baik swasta maupun umum, hendaknya berusaha melayani martabat serta tujuan manusia, seraya sekaligus berjuang dengan gigih melawan setiap perbudakan sosial maupun politik, serta mengabdikan kepada hak-hak asasi manusia di bawah setiap pemerintahan. Bahkan, lembaga-lembaga semacam itu lambat laun harus menanggapi kenyataan-kenyataan rohani, yang melampaui segala-galanya, juga kalau ada kalanya diperlukan waktu cukup lama untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.

*Artikel ini dikutip dari buku terjemahan R. Hardawiryana S., Dokumen Konsili Vatikan II, Jakarta: Obor, Dokumentasi dan Penerangan KWI, hal. 549 – 556.*



Redaksi Jurnal Bhumiksara: Royani Lim, Ludovicus Lubis, Thomas Eko

Susunan Kepengurusan Yayasan Bhumiksara

Organ Pembina : Prof. Dr. Thomas Suyatno (ketua), Prof. Dr. Bernadette N. Sefiadi (sekretaris)  
Mgr. M.D. Situmorang, OFM Cap, Mgr. J. Soenarka, SJ, Drs. St. Sularto

Organ Pengawas: Michael Utama Purnama, M.A. (ketua), HY Susmanto, M.B.M.

Organ Pengurus : Drs. J. Eddie Cahyono Putro M.B.A. (ketua), Dr. F.S.S. Ery Seda (wakil ketua), B. Djokodwihatmono, M.A. (sekretaris)  
Dr. Slamet Sarwono (bendahara), Yustinus M. Pinoto, M.B.A., Drs. Daniel Z. Kodirun, Ak., Y.W. Junardy

Direktur Eksekutif : Royani Lim

Sekretariat Yayasan Bhumiksara

Telp/Fax. 62.21.5745326, bhumiksara@gmail.com

Kampus Unika Atma Jaya, Gedung A, Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930

Bank: CIMB NIAGA Cabang Atma Jaya Jakarta, Giro No.: 440.01.00482.00.3 (a.n. Yayasan Bhumiksara)